

Seri Policy Entrepreneur Vol. 2

KITA BISA

Inspirasi Membangun Air Minum dan Sanitasi



Pokja AMPL Nasional

Kita Bisa

Inspirasi Membangun Akses Air Minum dan Sanitasi

Diterbitkan Oleh:



Kita Bisa

Inspirasi Membangun Akses Air Minum dan Sanitasi

Copyright © Pokja AMPL Nasional, 2015

Penulis:

Nurul Wajah Mujahid

Islahuddin

Yani Ardiansjah

Editor:

Ira Lubis

Aldy Mardikanto

Fany Wedahuditama

Tata Letak & Isi:

Widodo

Desain Sampul:

Widodo

i-x + 100 hal; 140 x 210 mm

ISBN: 978-602-72978-1-4

Penerbit :

Pokja AMPL Nasional

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

Kontributor

Nugroho Tri Utomo
Eko Wiji Purwanto
Laisa Wahanudin
Indrawan Prabaharyaka
Nur Aisyah Nasution
Rima Nadhira
Imam Safingi
Betanti Ridhosari
Tiara Anggita
Gery Margana
Rizqi Luthfiana
Tito Sulistiyo Adikusumo
Riosadja
Dwianto Wibowo
Rosdianahangka
Rini Harumi Wanashita
Cheerli
Dewi Septanty
Sheny Diah Puspita
Kania Mayang Lestari
Coursalina Tri Damayanti
Andry

Tentang Pokja AMPL

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk pada 1997 sebagai wadah komunikasi dan koordinasi pembangunan air minum dan sanitasi.

Pokja AMPL Nasional terdiri dari 8 Kementerian yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik.

Tugas Pokja AMPL yaitu:

1. Menyiapkan rumusan kebijakan.
2. Menyusun strategi dan program dalam pembangunan air minum dan sanitasi.
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan air minum.
4. Menyebarkan informasi AMPL.

Daftar Istilah

3R	<i>Reduce, Reuse, and Recycle</i>
ALC	<i>Active Leakage Control</i>
AMPL	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i> (Anjungan Tunai Mandiri)
BABS	Buang Air Besar Sembarangan
BP SPAMS	Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMPD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BSKPL	Bank Sampah Kenanga Peduli Lingkungan
BTP	Bumi Tamalanrea Permai
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
Dinas PU	Dinas Pekerjaan Umum
Dirut	Direktur Utama
DMA	<i>District Meter Area</i>
DPDR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GIS	<i>Geographical Information System</i> (Sistem Informasi Geografis)
HIPPAMS	Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IUWASH	Indonesian Urban Water Sanitation and Hygiene
KK	Kepala Keluarga
Kodam	Komando Daerah Militer
KUA	Kantor Urusan Agama
LLTT	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	Mandi Cuci Kakus
MLA	Multi Level Amalia
MLM	Multi Level Marketing
MWC	Majelis Wakil Cabang
NRW	<i>Non Revenue Water</i> (Penurunan Air Tak Berekoning)
NU	Nahdlatul Ulama

ODF	<i>Open Defecation Free</i> (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAH	Penampungan Air Hujan
PAL Jaya	Pengelolaan Air Limbah Jaya
PAM Jaya	Perusahaan Air Minum Jaya
Pamsimas	Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkot	Pemerintah Kota
Perda	Peraturan Daerah
Pokja	Kelompok Kerja
PP dan PL	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i>
PRV	<i>Pressure Reducing Valve</i> (Katup untuk Menurunkan Tekanan)
PTAL	Pembuangan Tinja dan Air Limbah
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RW	Rukun Warga
Sami Jaga	Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNI	Standar Nasional Indonesia
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
TPST	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
TTG	Teknologi Tepat Guna
UCLA ASPAC	<i>United Cities and Local Governments Asia Pacific</i>
UMK	Upah Minimum Kabupaten/Kota
UN ESCAP	<i>United Nation Economic and Social Commission for Asia Pacific</i>
UPTD	Unit Pelayanan Teknis Daerah
UUD	Undang-Undang Dasar
WC	<i>Water Closet</i>
WSLIC 2	<i>The 2nd Water and Sanitation for Low Income Communities</i>
WSP	<i>Water and Sanitation Program</i>
YMP NTB	Yayasan Masyarakat Peduli Nusa Tenggara Bara

Kata Pengantar

Penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat adalah sebuah keniscayaan bila negara ini hendak menuju masa depan yang lebih baik. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terkait erat dengan derajat kesehatan masyarakat, bangsa ini bisa melangkah tegap menuju tangga pembangunan ekonomi berikutnya. Akses air minum dan sanitasi yang layak, mudah, dan terjangkau merupakan salah satu kunci terwujudnya bangsa yang produktif. Tidak akan ada lagi anak-anak yang pertumbuhannya terganggu karena diare, tidak ada lagi kepala keluarga yang sering sakit dan harus absen bekerja, bahkan tidak ada lagi para ibu yang kehilangan waktu untuk mencuci dan mengambil air dari tempat yang jauh. Tidak ada lagi triliunan rupiah dana publik yang harus digunakan untuk membayar jaminan kesehatan bagi masyarakat yang sakit akibat buruknya pelayanan air minum dan sanitasi.

Mewujudkan akses universal air minum dan sanitasi yang layak bukanlah sebuah kemustahilan. Terdapat beragam jalan menuju ke sana. Tidak hanya melalui infrastruktur yang mahal yang dibangun pemerintah, namun bisa juga melalui inisiatif-inisiatif kecil masyarakat dengan teknologi sederhana. Inisiator pembangunannya tidak harus seorang pejabat namun juga bisa masyarakat biasa. Mereka bisa berasal dari seorang yang berada di hiruk-pikuknya kota besar yang bergelimang anggaran pembangunan namun juga bisa berasal dari mereka yang berada di keterpencilan dengan segala keterbatasannya.

Kepeloporan dalam pembangunan seringkali dilakukan oleh para *champion* yang memahami kunci-kunci perubahan dari sebuah pengalaman dan perenungan panjang. Buku “Kita Bisa” ini merupakan buku kedua dari rangkaian buku Policy Entrepreneur yang sengaja diterbitkan untuk menginspirasi berbagai pihak bahwa siapapun bisa berkontribusi dan menjadi champion. Semoga buku ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi para pelaku pembangunan air minum dan sanitasi namun juga bagi pelaku pembangunan di sektor - sektor lain.

Selamat membaca!

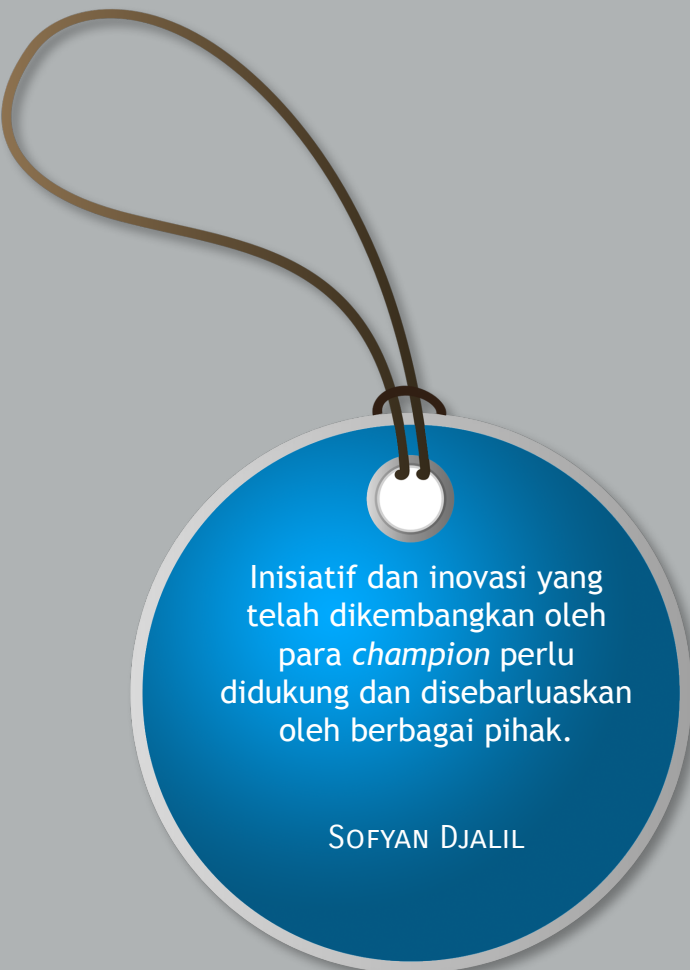


Arifin Rudiyanto, MSc,

Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

Daftar Isi

Kontributor	iii	
Daftar Istilah	v	
Kata Pengantar	vii	
Daftar Isi	ix	
Inspirasi Pembuka	1	
Bagian I	Melampaui Kemustahilan	5
	Panen Air Hujan di Tengah Kegersangan	7
	Menghasilkan Air di Tanah Tandus	10
	Tata Kelola yang Baik	14
Bagian II	Inovasi Jitu	17
	Solusi IPAL di Lahan Sempit	20
	Si Raja Gagal	22
	Mengatasi Kehilangan Air	23
Bagian III	Mengubah Paradigma	31
	Melayani dengan Hati	32
	Jihad Sanitasi	36
Bagian IV	Solusi Cerdas para Direktur	45
	Melayani yang 'Illegal' tanpa Melanggar Hukum	46
	Kredit Simbiosis Mutualisme	50
	Integrasi Pengolahan Air dan Limbah	50
Bagian V	Mengubah Menjadi Lebih Bermanfaat	59
	Mengolah Sampah Menjadi Uang	61
	Sampah Semakin Banyak Dilirik	65
	TPA Percontohan	66
Bagian VI	Gebrakan Pemimpin Lokal	69
	Memerangi BABS dari Segala Penjuru	70
	Membangun dari Lorong	72
	Walikota Air Minum	77
Bagian VII	Kolaborasi Sumber Daya	81
	Saling Mengisi	84
	Berbagi Informasi dan Strategi	88
Bagian VIII	Konduktor Pembangunan AMPL	91



Inisiatif dan inovasi yang
telah dikembangkan oleh
para *champion* perlu
didukung dan disebarluaskan
oleh berbagai pihak.

SOFYAN DJALIL

Inspirasi Pembuka

Menciptakan Nilai Tambah dalam Kehidupan

Sofyan Djalil *

Menteri PPN/Kepala Bappenas

"Small changes make a big difference."

Banyak perubahan-perubahan kecil yang menghasilkan sebuah perbedaan besar. Sebuah perubahan bisa dilakukan oleh siapa aja tanpa kecuali baik oleh seorang ustadz, camat, bupati bahkan seorang siswa SMP sekalipun. Dengan membangun sebuah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di suatu kampung ternyata dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Para ibu dapat menghemat waktu berjam-jam untuk mengambil air dan mencuci pakaian sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mengasuh anak dan melakukan kegiatan produktif rumah tangga lainnya. Angka kematian bayi dan tingkat kesakitan masyarakat dapat jauh berkurang sehingga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga untuk biaya pengobatan. Lebih jauh lagi produktifitas kepala keluarga dalam mencari nafkah tidak terganggu bahkan tingkat absensi siswa karena sakit pun dapat berkurang.

Sebenarnya banyak orang yang telah memberikan keteladanan dalam melayani masyarakat dan menjaga lingkungannya, namun kadang keberadaan mereka kurang terpublikasikan dengan baik sehingga kurang menginspirasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, menyampaikan inspirasi pembuka dalam “Knowledge Day” Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2015 yang digelar di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHU), Rabu (11/11/2015).

banyak orang untuk berbuat sama. Sebuah perubahan yang baik menciptakan banyak nilai tambah bagi kehidupan. Seorang kyai yang dengan telaten semasa hidupnya mengumpulkan sampah di sepanjang jalan yang dilaluinya telah memberikan nilai tambah bagi kebersihan lingkungan. Tradisi yang baik berupa menciptakan nilai tambah itu juga tercermin dari para inspirator yang ditampilkan dalam buku ini. Mereka telah

Sebenarnya banyak orang yang telah memberikan keteladanan dalam melayani masyarakat dan menjaga lingkungannya, namun kadang keberadaan mereka kurang terpublikasikan dengan baik sehingga kurang menginspirasi banyak orang untuk berbuat sama.

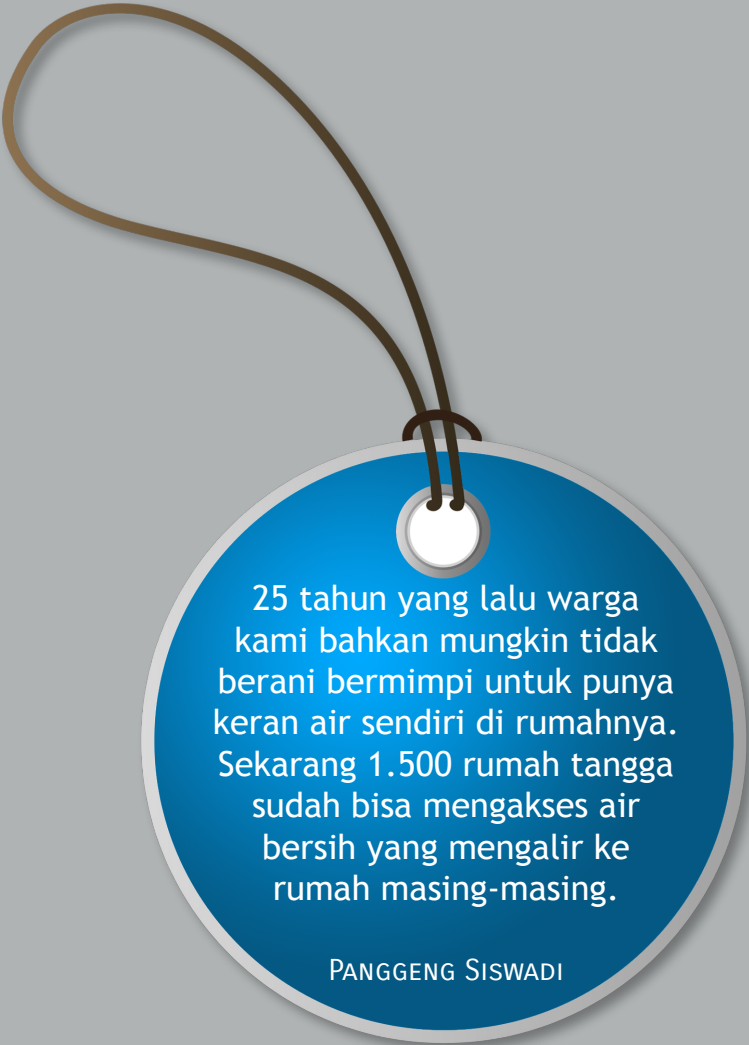


FOTO: BAPPENAS

berhasil menciptakan solusi alternatif dalam mengatasi segala keterbatasan dan kemampuan yang dialami masyarakat tanpa menunggu bantuan pemerintah. Dalam hal tertentu inisiatif masyarakat dan swasta dapat bergerak lebih efisien dan lebih cepat melampaui pemerintah yang seringkali terikat oleh berbagai prosedur dan keterbatasan anggaran.

Inisiatif dan inovasi yang telah dikembangkan oleh para champion perlu didukung dan disebarluaskan oleh berbagai pihak. Semoga karya-karya inovatif dari para inspirator ini makin menginspirasi banyak kalangan untuk berbuat yang sama dalam meningkatkan pembangunan akses air minum dan sanitasi.

*Tulisan disarikan dari pidato Menteri PPN
dalam acara Knowledge Day 2015



25 tahun yang lalu warga kami bahkan mungkin tidak berani bermimpi untuk punya keran air sendiri di rumahnya. Sekarang 1.500 rumah tangga sudah bisa mengakses air bersih yang mengalir ke rumah masing-masing.

PANGGENG SISWADI

1 | Melampaui Kemustahilan

Air adalah kehidupan. Keberadaannya sangat penting bagi semua sendi kehidupan. Namun faktanya, kini masih banyak daerah yang sulit mengakses air atau memiliki keterbatasan pada kebutuhan pokok ini. Kondisi ini berakibat pada kualitas hidup, terutama pada tingkat kesehatan masyarakat.

Keterbatasan pada akses ini misalnya terjadi di Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon, Jawa Barat. Minimnya akses pada air minum membuat banyak rumah dan fasilitas umum seperti sekolah yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang baik. Akibatnya mereka biasa buang air besar sembarang (BABS) dan tidak terbiasa hidup bersih dan sehat.

Wilayah tandus dan tidak memiliki sumber air tanah yang baik ini misalnya dialami warga Desa Tlanak yang terletak di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini. Akibat wilayahnya yang tandus dan kondisi air tanah yang tidak baik membuat warganya kesulitan mengakses air. Sebagian mereka bahkan menganggap kondisi adalah takdir mereka yang



harus diterima dan tidak mungkin bisa diubah. Namun itu semua kini hanya tinggal kenangan.

Siapa sangka, kini warga Desa Tlanak tidak hanya mudah mengakses air, namun juga mampu mengairi desa lain, Perubahan besar juga dialami beberapa sekolah di Argasunya, Cirebon yang kini mampu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sanitasi di sekolah. Tidak ada lagi siswa yang terpaksa buang air besar sembarangan (BABS) di kebun atau tempat terbuka lainnya dekat sekolah.

Semua perubahan yang mungkin sebelumnya dianggap mustahil itu hanya bisa terwujud dari kemauan dan kerja keras. Dan di balik kerja keras itu ada peran para inspirator yang mampu mengajak banyak pihak untuk bersama memikirkan dan melakukan upaya dalam mengubah kemustahilan menjadi sebuah kenyataan.



FOTO-FOTO: ROY RUBIANTO

Syaeful Badar dan fasilitas Penampungan Air Hujan (PAH) di salah satu sekolah di Desa Argasunya Kota Cirebon

Panen Air Hujan di Tengah Kegersangan

Perjuangan sulit yang awalnya seakan mustahil untuk dilakukan dialami Syaeful Badar di Cirebon. Syaeful melihat tidak semua kelurahan di Kota Cirebon bisa memiliki akses air minum. Selama ini pasokan air untuk Kota Cirebon banyak dikirim dari Kabupaten Kuningan. Namun masalahnya, kiriman air tersebut tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan 22 kelurahan, termasuk Kelurahan Argasunya.

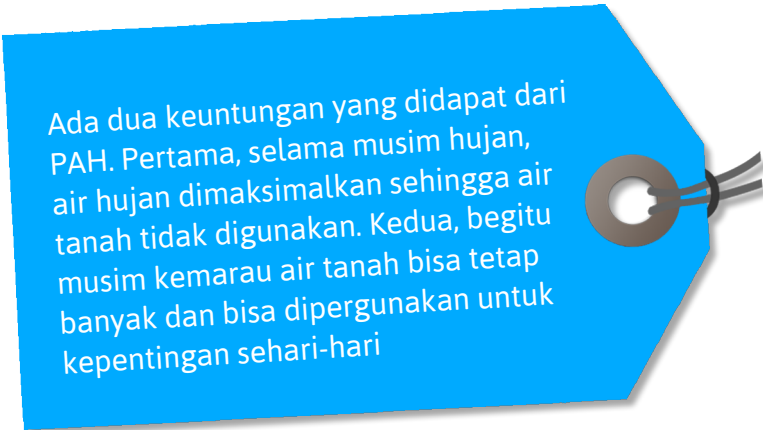
Apalagi secara geografis Kelurahan Argasunya terletak di daerah berbukit. Wilayahnya didominasi lahan berbatu cadas, serta banyak galian C (tipe area daerah pasir, bebatuan dan cadas) Warga juga sangat sulit membangun sumur. Beberapa dari mereka pernah mencoba menggali sumur hingga kedalaman 60 meter. Hasilnya nihil, air tak juga mau keluar. Kondisi ini membuat warga, termasuk anak sekolah kesulitan untuk melakukan

aktivitas MCK (mandi cuci kakus).

Fasilitas toilet yang dimiliki sekolah tidak bisa dipakai, karena tidak memiliki air. Akibatnya siswa terpaksa buang air kecil maupun besar di luar toilet seperti kebun dan lahan kosong. Ini tentu merupakan sebuah perilaku yang tidak sehat yang tidak hanya membahayakan lingkungan, namun juga kesehatan mereka.

Melihat keadaan seperti itu, Syaeful mulai berpikir bagaimana caranya menyediakan air di tengah keterbatasan. Dia pun mulai mempelajari pola curah hujan di wilayah itu. Dia melihat air hujan berpotensi untuk dijadikan sumber air bagi masyarakat Argasanya. Caranya adalah dengan menampung air hujan. Sebelum menjalankan aksinya, Syaeful terlebih dahulu melakukan survei bersama Tim Kelompok Kerja (Pokja) perubahan iklim Kota Cirebon.

Target pertama yang dia bidik adalah beberapa sekolah di Argasanya. Dia mensurvei delapan sekolah dasar (SD) di Kelurahan Argasanya. Lantas, dari survei itu dia memilih empat SD yang dijadikan *pilot project* pemanfaatan air hujan. Di empat SD tersebut, Syaeful membuat sistem penampungan air hujan



Ada dua keuntungan yang didapat dari PAH. Pertama, selama musim hujan, air hujan dimaksimalkan sehingga air tanah tidak digunakan. Kedua, begitu musim kemarau air tanah bisa tetap banyak dan bisa dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari

(PAH). Teknologi dan instalasinya sederhana. Cukup memasang beberapa paralon di atap untuk mengalirkan air hujan ke penampung air (toren/tangki). Ada dua toren yang dipergunakan dengan masing-masing berukuran 1.500 liter.

Dengan peralatan sederhana, melalui pembangunan jaringan pipa, air hujan ditampung untuk dijadikan persediaan air. Kemudian air disaring dengan saringan yang menggunakan batu krikil, kain kasa, serabut, atau juga sebagian menggunakan pecahan genteng dan batu bata. Hasil saringan air masuk ke toilet melalui pipa. Solusi sederhana ini benar-benar menjadi jawaban. Tak hanya siswa sekolah yang kini bisa merasakan manfaatnya, tapi juga warga sekitar.

Lewat cara ini, selama musim hujan mereka sama sekali tidak menggunakan air tanah, sehingga bisa hemat dalam penggunaan listrik karena biasanya disedot menggunakan pompa. Sementara di musim kemarau, persediaan air tanah bertambah sehingga mulai bisa disedot dengan baik. Air yang ditampung selama musim hujan, juga dimanfaatkan pada musim kemarau, walaupun tidak sepanjang musim.

“Ada dua keuntungan yang didapat dari PAH. Pertama, selama musim hujan, air hujan dimaksimalkan sehingga air tanah tidak digunakan. Kedua, begitu musim kemarau air tanah bisa dipergunakan keempat SD, karena air hujan yang tidak tertampung saat musim hujan langsung masuk ke tanah. Saya minta ke sekolah supaya tanah di bawah toren itu jangan dipelur (disemen) agar air yang tidak tertampung di toren langsung masuk ke tanah. Maksudnya agar air tersebut dapat digunakan lagi ketika musim kemarau tiba,” jelas Syaeful.

Usaha yang dilakukan Syaeful dan kawan-kawannya sejak 2013 itu kini mulai dicontoh masyarakat dengan memanfaatkan drum bekas, ember, atau toren yang harganya terjangkau

untuk membuat penampungan air hujan. Masyarakat bisa menggunakan tiga drum bekas. Drum pertama untuk menerima curahan air hujan. Sedangkan drum selanjutnya untuk air yang sudah disaring. “Untuk penyaringan kami hanya menyarankan menggunakan pecahan genteng dan batu bata,” cerita Syaeful.

Pola yang diterapkan Syaeful tersebut semata-mata ingin memanfaatkan air hujan yang merupakan berkah agar tidak terbuang begitu saja tanpa bisa dimanfaatkan kembali. Cara ini juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan terutama dalam penggunaan air tanah secara berlebihan.

Cara yang digunakan Syaeful dulu mungkin tak pernah terpikirkan. Ini sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan yang ada bukan sebuah nasib yang harus diterima begitu saja. Pasti ada jalan jika kita punya kemauan untuk mengubahnya. Paling tidak, keberhasilan Syaeful memanfaatkan air hujan, sekali membuktikan, daerah yang dulu dianggap mustahil mendapatkan air minum ternyata mampu mengalirkannya secara berkelanjutan.



Menghasilkan Air di Tanah Tandus

Inovasi masyarakat yang lahir dari keterbatasan juga dipraktikkan oleh Panggeng Siswadi yang kini menjadi ketua Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) Tirto



FOTO-FOTO: ARIF FADILLAH

- 1 : Panggeng Siswadi berada di Desa Tlanak yang gersang
- 2 : Perpipaian yang dibangun HIPPAMS Tirto Agung Desa Tlanak

Agung, Desa Tlanak, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Nama Panggeng bagi sebagian besar orang mungkin bukan siapa-siapa. Maklum dia bukanlah *public figure* kelas wahid seperti selebritas atau politisi. Dia hanyalah orang biasa yang berprofesi sebagai seorang guru.

Tapi, bagi warga beberapa desa di Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, pria kelahiran Bojonegoro, 15 Mei 1963 ini bisa mengubah wilayah tempat tinggalnya yang dulu tandus kini menjadi pemasok air. Kisah sukses Panggeng bermula pada 25 tahun lalu di mana desa tempatnya tinggal tidak memiliki sumber air.

Sebenarnya, Panggeng bukanlah penduduk asli Desa Tlanak. Dia baru menetap di desa itu setelah menikah dengan penduduk setempat. Sejak awal menikah dan menetap di Desa Tlanak, Panggeng bermimpi akan membangun keluarga barunya di desa tersebut dengan bahagia dan sejahtera serta tidak kekurangan apapun, terutama dalam hal akses air minum. Tapi apa mau dikata, mimpi Panggeng hanyalah sebuah mimpi belaka.

Harapannya membangun keluarga sejahtera dan mengakses air minum. Ditambah lagi, dia mesti menyaksikan warga yang buang air besar sembarangan saban hari. Sebagai seorang guru, Panggeng sangat khawatir dengan keberlangsungan anak cucunya kelak. Bagaimana mungkin membangun keluarga sehat di tengah kondisi semacam itu.

Saat musim kemarau, warga mesti bersusah payah mencari air hingga 2 sampai 3 kilometer jauhnya dengan menggunakan jerigen. Angin segar mulai berhembus ketika PDAM membangun perpipaan di desanya. Tapi, harapan tinggal harapan. Fasilitas PDAM itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Air dari PDAM pun tak mengalir lama, tak sampai dua tahun. Tidak berfungsinya fasilitas PDAM ini membuat Desa Tlanak kembali mengalami

krisis air minum. Ketiadaan air ini membuat masyarakat terpaksa kembali buang air besar sembarangan.

Saat itu ada beberapa warga yang mencoba membuat sumur pompa. Tapi hasilnya tetap nihil. Padahal, tanah yang dibor sudah mencapai puluhan meter. Di tengah kegalauan, Panggeng merenung, dalam benaknya dia berpikir agar bisa mengakses air minum yang layak.

Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia menikah, Panggeng dan warga sekitar harus hidup tanpa air minum yang memadai. Dia pun mulai tak sabar. Akhirnya pada 1995 Panggeng mulai mengajak sejumlah warga bergerak secara mandiri untuk mengubah nasib. Mereka akhirnya memutuskan patungan membeli tanah di desa tetangga untuk membuat sumur bor. Di Tanah yang dibelinya itu, Panggeng memutuskan membor tanah hingga kedalaman 100 meter. Ternyata hitungan Panggeng benar, air bisa mengalir bahkan mencapai 10 liter per detik. Dari situ, Panggeng pun mengajukan proposal ke Dinas Kesehatan. "Kami beranikan diri melobi ke pejabat kabupaten dan DPRD. Alhamdulillah usaha kami berhasil," kisahnya.

Akhirnya pada tahun 2007 Panggeng dan warga Desa Tlanak mendapat bantuan proyek WSLIC 2 (*The Second Water and Sanitation for Low Income Communities*) dari Dinas Kesehatan untuk membangun sarana air minum secara swakelola. Proyek ini rampung pada Desember 2007. "Itulah awal kami mendirikan HIPPAMS Tirto Agung," katanya.

Sejak itulah warga Desa Tlanak bisa memiliki sambungan air ke rumah. Padahal, sebelumnya warga bahkan tidak berani bermimpi memiliki keran air di rumah. Namun adanya sambungan air ini bukan berarti masalah selesai. Perlu ada upaya dan komitmen yang kuat agar ketersediaan air bisa berkesinambungan. Caranya adalah dengan mengelola.

HIPPAMS secara serius. Itu artinya, harus ada pengurus HIPPAMS yang benar-benar bertanggungjawab

Hasil rembuk desa sepakat memilih Panggeng sebagai ketua. “Saya menerima dengan mengucapkan *Bismillah* akan pegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman bilang pengelola HIPPAMS ini sering disebut dengan Romli alias rombongan *lillahitaalla*,” gurau Panggeng.

Berkat kegigihan para pengurusnya, kini HIPPAMS mampu melayani kebutuhan air di 4 desa dengan total jumlah pelanggan sebanyak 1.500 rumah tangga. Ini merupakan jumlah rumah

Tata Kelola yang Baik

HIPPAMS Tirto Agung tidak hanya mampu mengairi empat desa, namun juga berhasil mengantongi keuntungan. Setiap bulan, HIPPAMS bisa mengantongi keuntungan hingga Rp 8 juta. Mereka juga mampu membayar karyawan HIPPAMS yang rata-rata terdiri ibu rumah tangga dan buruh.

“Alhamdulillah apa yang kami rintis akhirnya membuahkan hasil. Sejak Januari 2010, kami pengurus dan karyawan sudah menerima honor yang lumayan yaitu hampir setara UMK (Upah Minimum Kabupaten) Lamongan ditambah uang tunjangan lain. Kami juga selalu surplus rata-rata pendapatan bersih kami Rp 8 juta per bulan,” ungkapnya bangga.

Ada tiga resep sukses yang selama ini dipegang kuat Panggeng, yaitu *bener*, *pinter*, dan *kober*. Penjelasan, *bener* itu artinya jujur amanah. Semua rincian pengeluaran pendapatan sebarang apapun besarnya harus dilaporkan secara terbuka.

Sementara *pinter*, pengurus juga harus pandai terutama bagi seorang ketua yang mesti pintar melobi dan mengelola dengan baik. Agar *pinter* mengelola HIPPAMS, para pengurusnya juga mengikuti

tangga terbesar yang dilayani HIPPAMS di Kabupaten Lamongan. HIPPAMS mampu mengalirkan air selama 24 jam dalam satu hari, serta angka kehilangan air dapat ditekan serendah mungkin. Atas semua pencapaiannya, HIPPAMS Tirto Agung menjadi juara I lomba HIPPAMS se-provinsi Jawa Timur. Malah HIPPAMS Tirto Agung sering dijadikan tempat studi banding dari berbagai daerah.

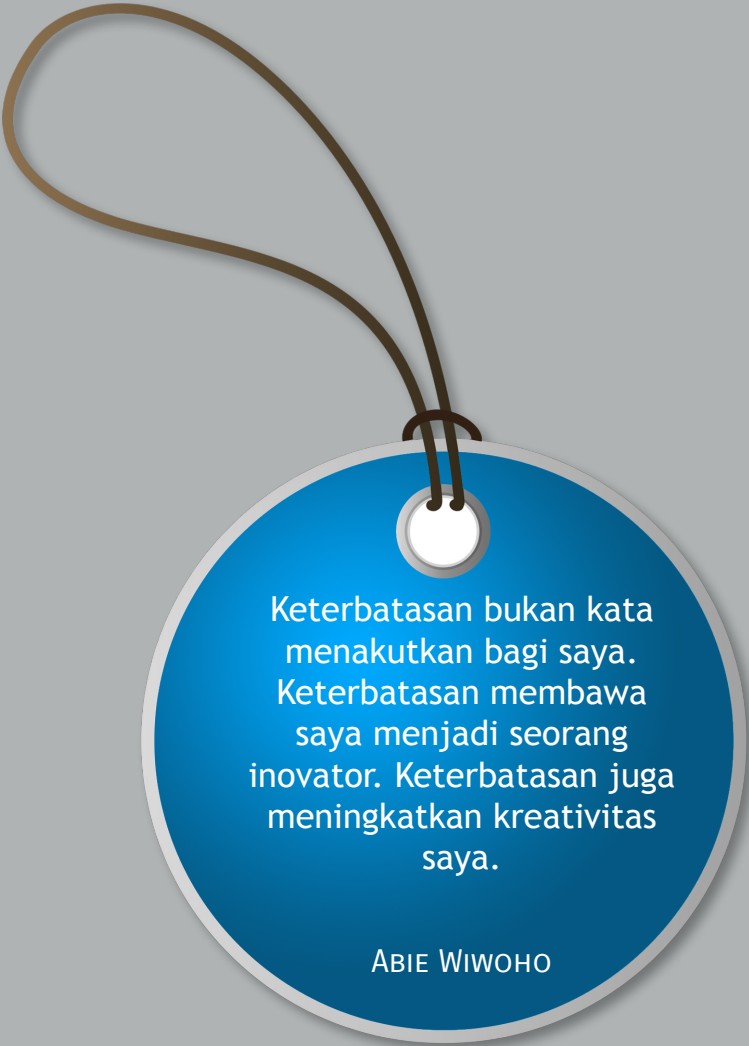
Panggend dan warga Desa Tlanak bisa membuktikan bahwa dengan kesungguhan, tidak ada kata mustahil bagi mereka. Air yang pada puluhan tahun lalu dianggap tak mungkin mereka akses, kini bisa mudah dimanfaatkan.

training agar memiliki kemampuan dan skil dalam mengelola manajemen HIPPAMS dengan baik.

Sedangkan *kober* adalah sempit atau harus disempatkan. Sesibuk apapun para pengurus, mereka akan sempatkan waktu untuk mengurus kelompok ini. Seiring dengan perkembangan HIPPAMS yang begitu pesat, kini 3 desa tetangga mulai mendaftarkan diri menjadi pelanggan.

Saat ini para pengurus HIPPAMS Tirto Agung ditantang untuk meminjam dana sendiri dari bank agar bisa memperluas akses air minum. Mereka juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola manajemen HIPPAMS seperti cara membuat laporan laba-rugi, hingga cara menyusun aset.

Sejak itu pengelolaan HIPPAMS Tirto Agung sudah sangat terstruktur dan terorganisir. Aspek legalitas, keuangan, teknis dan penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian pengelola HIPPAMS. Berkat usaha mereka, kini Desa Tlanak berhasil menjadi salah satu desa yang telah melaksanakan pembangunan instalasi air minum berbasis masyarakat dari pemerintah pusat.



Keterbatasan bukan kata menakutkan bagi saya. Keterbatasan membawa saya menjadi seorang inovator. Keterbatasan juga meningkatkan kreativitas saya.

ABIE WIWOHO

2 | Inovasi Jitu

Banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini biasa dipakai orang untuk menunjukkan bahwa dalam setiap masalah pasti ada beragam cara untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan berbagai problem yang dihadapi dalam memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi. Solusi bisa datang berupa teknologi sederhana namun efektif. Di sinilah peran inovator sangat diperlukan dalam mengatasi masalah yang berlarut-larut.

Di antara masalah yang sering dihadapi sektor sanitasi adalah ketersediaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di wilayah padat dan kumuh. Di kawasan kumuh, luas rumah umumnya kecil, dan saling berhimpitan, hampir tidak ada lokasi kosong yang bisa dipergunakan untuk IPAL. Akibatnya, tinja sering langsung dibuang ke selokan atau sungai yang ada di sekitar mereka yang membahayakan kesehatan.

Abie Wiwoho, sebagai dosen dan pengajar mata kuliah Pembuangan Tinja dan Air Limbah (PTAL) di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jakarta II sangat menyayangkan kondisi ini. Sebagai orang yang lama berkecimpung di penyehatan lingkungan,



dia memberikan perhatian pada masalah yang dihadapi warga kawasan kumuh. Dia bertekad untuk menghadirkan IPAL yang cocok untuk kawasan kumuh. Dan setelah puluhan tahun mengabdikan di tengah masyarakat, IPAL itu pun berhasil diwujudkannya.

Sementara itu di dalam layanan air minum perpipaan, masalah yang kerap dihadapi adalah kehilangan air (*Non Revenue Water*/



FOTO: ROY RUBIANTO

Abie Wiwoho bersahabat
dengan kawasan kumuh

NRW), seperti yang pernah dihadapi oleh PDAM Kota Malang. Pada tahun 2010 NRW PDAM Kota Malang mencapai 50%, namun dalam beberapa tahun kemudian, NRW berhasil ditekan sampai di bawah 20%.

Bagaimana dua masalah itu bisa diatasi dengan baik? Inovasi dan berpikir di luar kotak (*out of the box*) merupakan dua cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Solusi IPAL di Lahan Sempit

Abie Wiwoho sudah lama mengetahui masalah yang dihadapi permukiman kumuh, khususnya yang ada di Jakarta Utara. Banyak rumah tangga yang tidak memiliki sistem pengolahan air limbah yang baik, karena tidak memiliki lahan yang cukup. Dia berhasil menciptakan teknologi tepat guna yang cocok untuk kawasan kumuh dan padat di Jakarta.

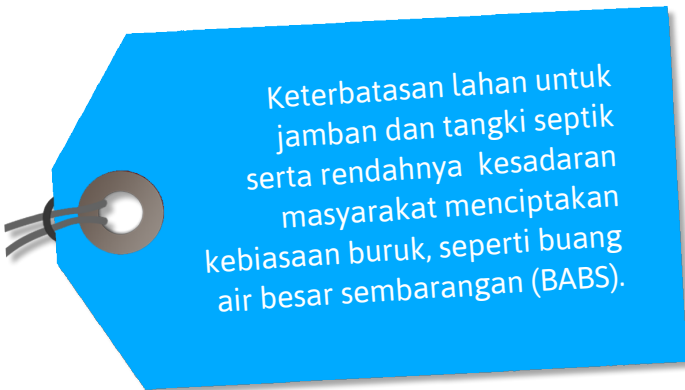
Selama ini Abie melihat, permukiman kumuh selalu identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana permukiman yang layak, termasuk infrastruktur sanitasi. Bagi penghuni permukiman kumuh, yang penting bisa tinggal dan hidup di wilayah itu saja sudah cukup.

Mereka mungkin punya kamar mandi dan jamban, namun jangan tanya soal ke mana limbah hasil buangan itu disalurkan. Umumnya, limbah yang berupa tinja itu dibuang sembarangan, ke selokan atau sungai. Tak pelak, sumber air di sekitar permukiman kumuh sekaligus menjadi “ladang” sumber penyakit. Umumnya, masyarakat permukiman kumuh kerap terjangkit infeksi yang disebabkan limbah manusia. Berdasarkan sejumlah penelitian, 74% penyakit infeksi diakibatkan limbah manusia.

Permasalahan tidak hanya berasal dari keterbatasan lahan untuk prasarana dan sarana pengolahan air limbah. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kondisi kerap dihadapi dalam pembangunan sektor sanitasi. Keterbatasan lahan untuk jamban dan tangki septik serta rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan kebiasaan buruk, seperti buang air besar sembarangan (BABS).

Abie berhasil menemukan solusi mengatasi masalah keterbatasan lahan untuk tangki septik di permukiman kumuh. Inovasi inilah yang menyadarkan banyak pihak bahwa

membangun sarana dan prasarana pengolahan air limbah di permukiman padat penduduk bukanlah kendala lagi. Dia membangun tangki septik dengan cara yang unik. Karena terbatasnya lahan yang ada, tentu saja dibutuhkan teknik tersendiri dalam cara membangun proyek sanitasi. Terutama untuk mensiasati pondasi rumah di permukiman kumuh yang rata-rata mempunyai pondasi yang dangkal. Jika penggalian empat kompartemen dilakukan bersamaan, maka rumah yang ada berpotensi roboh. Apalagi tangki septik itu dibangun tepat disamping dinding rumah. Dalam memberikan solusi mengenai



pengolahan tinja dan limbah cair, Abie menggunakan teknologi biofilter yang dia rancang dengan menggunakan rumus “Wiro Sableng”, pendekar bersenjata kapak maut Naga Geni 212. Bedanya, dalam membuat IPAL Abie menggunakan rumus 212 Wiro Sableng menjadi kedalaman lubang biofilter untuk tinja setinggi 2 meter, lebar 1 meter, dan panjang 2 meter. Pembuatan IPAL buatan Abie sangat sederhana, mudah, dan murah.

Untuk mengakalinya, Abie menggali satu-persatu tangki dari empat tangki yang akan dibangun. Setelah tangki pertama

dibangun, baru lobang untuk tangki kedua digali, begitu seterusnya. Cara ini aman untuk menghindari potensi rumah roboh. Menurut Abie, metode ini dia temukan langsung ketika mengunjungi lapangan dan melihat tantangan yang ada. Bagi Abie, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan sepanjang mau untuk mencari solusinya.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat tangki septik ini adalah porositasnya (ukuran dari ruang kosong di antara material, dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume) sebesar 90%. Konstruksi bangunannya terdiri dari empat tangki. Tangki pertama dan kedua berfungsi seperti tangki septik, untuk memisahkan lumpur. Sedangkan tangki ketiga dan keempat diisi media biofilter yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas limbah cairnya. Tangki septik ini bisa dipergunakan untuk delapan kepala keluarga dengan kapasitas empat meter kubik per hari.

Air buangan yang dihasilkan berupa *effluent* (dari suatu sistem pengolahan air limbah) yang sangat jernih. Dalam berbagai

Si Raja Gagal

Abie Wiwoho sudah menekuni profesi sanitarian sejak tahun 1974, saat dia baru selesai kuliah. Aktivitasnya dalam menangani sarana air minum dan jamban keluarga (Sami Jaga) membuatnya pernah dijuluki “Mantri Kakus”.

Sejak dulu, hingga menjadi dosen, Abie tidak pernah berhenti mencoba berinovasi di bidang instalasi pengolahan air limbah. Banyak percobaan yang dilakukannya dan banyak mengalami kegagalan. Tidak heran dia mendapat julukan “Raja Gagal” . Tapi Abie tidak pantang menyerah, sehingga akhirnya

kesempatan, Abie dengan bangga memperlihatkan *effluent* yang dihasilkan IPAL buaatannya. Dia mengambil air dari masing-masing penyaringan dan dimasukkan dalam botol air mineral untuk diperlihatkan kepada masyarakat, khususnya penggiat sanitasi. Terlihat jelas bagaimana hasil saringan pertama, kedua, dan ketiga sangat berbeda dan cukup jernih. Inilah buah kerja keras dari bergelut dengan air kotor untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bersih.

Kini, tangki septik rancangan Abie sudah bisa dinikmati warga Kelurahan Penjaringan RW 12 dan Sunter Barat RW 04 Cilincing Jakarta Utara. Abie berharap lebih banyak lagi orang untuk turun ke lapangan dan melihat langsung masalah yang ada.

Mengatasi Kehilangan Air

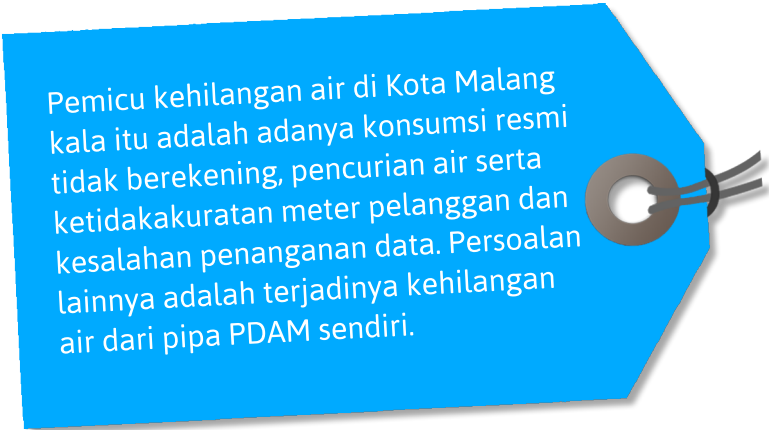
Dalam mengawali sebuah perubahan, terlebih dahulu harus melihat masalah dan peluang yang bisa dilakukan. Hal ini dilakukan oleh Suwito, Manajer NRW PDAM Kota Malang. Hingga

berhasil merancang instalasi pengolahan air limbah yang cocok untuk permukiman kumuh seperti di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kawasan kumuh memberikan inspirasi bagi Abie. Dia berhasil merancang tangki septik kecil yang tidak memerlukan lahan luas, namun mampu menjernihkan air. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat tangki septik ini juga murah karena menggunakan bahan material yang ada di sekitarnya, seperti sampah botol minuman fermentasi, tempurung kelapa, tutup botol, hingga kulit kerang sebagai media biofilter.

tahun 2010, hampir 50% air yang diproduksi PDAM hilang entah ke mana. Masalah ini sempat membuat Walikota Malang membuat teguran keras kepada direksi PDAM Kota Malang. Tentu saja Direksi PDAM Kota Malang galau mendapat teguran semacam itu. Mereka harus mencari jalan keluar agar masalah ini bisa diatasi.

Sebagai gambaran, berdasarkan data audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tahun 2012 rata-rata tingkat kehilangan air (*Non Revenue Water/NRW*) nasional sebesar 31% dari total produksi air minum nasional yang sebesar 127.000 liter/detik. Jika satu kubik air dihargai Rp2.000, maka Indonesia sesungguhnya telah kehilangan penerimaan sebesar Rp2,48 triliun per tahun atau setara dengan 3,15 juta sambungan baru. Faktanya, masih banyak perusahaan air minum yang memiliki angka kebocoran air melebihi angka rata-rata NRW nasional, termasuk PDAM Kota Malang kala itu.



Pemicu kehilangan air di Kota Malang kala itu adalah adanya konsumsi resmi tidak berekening, pencurian air serta ketidakakuratan meter pelanggan dan kesalahan penanganan data. Persoalan lainnya adalah terjadinya kehilangan air dari pipa PDAM sendiri.

Untuk itu, direksi PDAM Kota Malang didorong untuk menekan angka NRW serendah mungkin. Guna mencapai target tersebut, segenap direksi menunjukkan komitmen yang tinggi menyelsaikannya, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka kemudian memasukkan Unit Kehilangan Air (NRW) dalam struktur organisasi PDAM. Unit ini bertugas melakukan sejumlah usaha, mulai dari pemetaan wilayah pelayanan, hingga peningkatan kualitas peralatan.

Menurut analisa Suwito, Manajer NRW PDAM Kota Malang, pemicu kehilangan air di Kota Malang kala itu disebabkan konsumsi resmi tidak berekening, pencurian air serta ketidakakuratan meter pelanggan dan kesalahan penanganan data. Persoalan lainnya adalah terjadinya kehilangan air dari pipa PDAM sendiri. "Pada akhir tahun 2015 kami ditarget bisa menekan NRW hingga angka 16%. Kami optimistis bisa mencapai target tersebut," tegas Suwito.

Tak mau menyia-nyiakan waktu, perbaikan kinerja PDAM Kota Malang pun dilakukan sejak 2009 lalu. Kala itu Walikota Malang meminta PDAM bekerja lebih keras dalam memproduksi dan mengelola distribusi air kepada warga Kota Malang. Ironisnya, masalah kebocoran air di PDAM seringkali menjadi persoalan yang menggelitik. Bagaimana tidak, banyak pegawai PDAM yang justru tidak tahu di mana saja letak pipa airnya. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Kota Malang, tapi juga di kota-kota lain. "Lucu kalau ada rekan bilang aliran tersendat, mungkin ada kebocoran. Lalu saya tanya bocor di mana, pipa induknya di mana, jawabannya pasti *ndak* tahu pak," kisah Suwito.

Nah, kalau sudah begitu, bagaimana melakukan tindakan jika jalur pipanya saja tidak tahu di mana letaknya. Hal inilah yang membuat Suwito berpikir mesti dilakukan perubahan sistem di PDAM. Karena itulah dilakukan restrukturisasi besar-

besaran. Lantas, bagaimana cara PDAM Kota Malang mengatasi permasalahan kehilangan air sekaligus meningkatkan wilayah zona air minum prima, Direksi PDAM Kota Malang kemudian memutuskan menggunakan sistem DMA (*District Meter Area*). Sistem ini mempermudah pemantauan dan pengelolaan, termasuk mudah untuk melakukan tindakan kebocoran, mudah



melakukan pengelolaan tekanan, dan mudah melakukan percepatan saat terjadi masalah. Saat ini PDAM Kota Malang sudah memiliki 155 DMA yang tersebar dalam 11 zona pelayanan. “Kami memperbaiki kualitas DMA dan secara bersamaan juga meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) PDAM Kota Malang,” tambah Suwito.



FOTO : PDAM KOTA MALANG

Petugas PDAM Kota Malang sedang mengecek tingkat kebocoran air

Langkah awal untuk melakukan tindakan kehilangan air dengan menggunakan metode *pressure management* dengan memanfaatkan alat bantu yang disebut dengan PRV (*pressure reducing valve*). Selain itu, DMA tentu harus sempurna. Rata-rata DMA yang dimiliki PDAM Kota Malang sudah dalam kategori super yang diantaranya dilengkapi dengan PRV yang berfungsi mengatur tekanan secara otomatis. Fungsi PRV sangat penting, karena alat ini bisa mengontrol tekanan dan mengukur aliran.

DMA yang dimiliki PDAM Kota Malang juga dilengkapi dengan *blind flange* (tutup katup) yang berfungsi menghindari buka-tutup batas DMA yang dapat mengacaukan perhitungan kebocoran dan sistem distribusi air.

Penggunaan teknologi ini sangat membantu pemantauan distribusi air, terlebih alat ini bisa menurunkan dan menaikkan tekanan secara otomatis. Langkah selanjutnya adalah dengan memanfaatkan ALC (*active leakage control*) yakni mengontrol terjadinya kebocoran secara terus menerus dan tidak boleh berhenti. "Ini berbiaya mahal tapi wajib dilakukan," tegas Suwito.


Biasanya satu DMA bisa memantau sambungan air untuk 500 hingga 3.000 pelanggan. Menurut Suwito, DMA harus dikelola dan dipantau setiap saat agar stabil. Tim NRW mengidentifikasi setiap DMA yang ada. DMA yang mempunyai NRW besar akan didahulukan penanganannya agar angka kebocorannya cepat diturunkan. Pada awalnya, banyak DMA yang mempunyai NRW hingga 30%. Kini seiring dengan kualitas DMA yang semakin baik, NRW pun semakin rendah.

Dana yang diinvestasikan PDAM Kota Malang untuk satu DMA berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 400 juta. Harga satu DMA bisa tidak sampai Rp 200 juta jika ada kualitas yang dikurangi, namun PDAM Kota Malang tidak ingin mengurangi kualitas DMA agar bisa maksimal mencegah kebocoran. Penyempurnaan DMA

juga membuat manajemen PDAM bisa memantau DMA secara *online*. “Investasi yang sudah dilakukan untuk penyempurnaan DMA sudah mencapai sekitar Rp 50 miliar,” jelas Suwito.

PDAM Kota Malang juga melengkapi layanannya dengan menerapkan Sistem Informasi Geografis (GIS). GIS harus termutakhirkan pada setiap transaksi seperti pada saat penyambungan baru, pelayanan pelanggan, penggantian meter, perencanaan, pengembangan jaringan, perawatan, dan lainnya. Saat ini jumlah pelanggan PDAM Kota Malang sekitar 143 ribu pelanggan. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yang hanya sebesar 90 ribu pelanggan. Suwito yakin bisa lebih meningkatkan layanan kepada konsumen di masa mendatang. Apalagi Pemerintah Kota Malang memberikan dukungan yang besar, termasuk dalam hal penyertaan modal.

Penyertaan modal ini juga merupakan bentuk perhatian Pemkot Kota Malang untuk peningkatan akses air minum. “Penyertaan modal yang diberikan Pemkot Malang sangat membantu kinerja PDAM,” pungkasnya.



“Jihad Sanitasi” harus dilakukan oleh semua orang dimulai dari diri sendiri, dimulai sekarang juga. Siapapun bisa bergabung melaksanakan jihad sanitasi.

H. BAHRUDIN

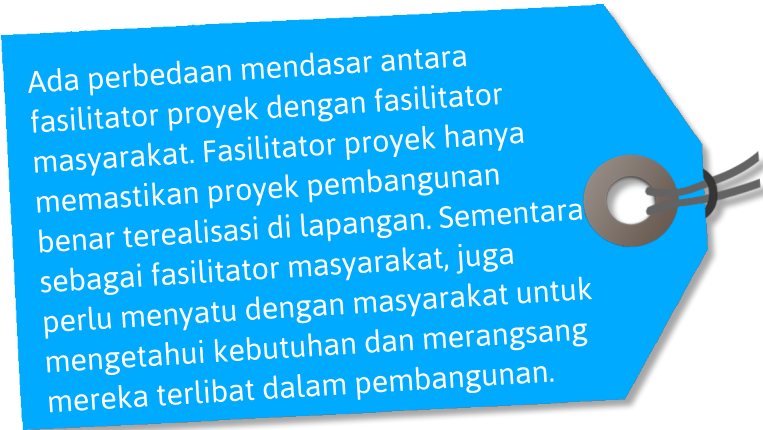
3 | Mengubah Paradigma

Cara-cara biasa seringkali tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, begitu juga untuk masalah sanitasi dan air minum. Oleh karena itu diperlukan cara luar biasa untuk merangsang keterlibatan masyarakat secara langsung.

Dalam menyelesaikan masalah keterbatasan akses air minum dan sanitasi tidak dapat dilakukan dengan *project oriented* semata. Kunci keberhasilannya tidak terletak pada terbangunnya infrastruktur, namun pada termanfaatkannya pembangunan tersebut. Infrastruktur yang terbangun harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan menambah akses bagi masyarakat. Dengan demikian pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan upaya lebih jauh lagi untuk menciptakan kebutuhan tersebut.

Pendekatan *project oriented* ini sering kali tidak berhasil di

tengah masyarakat. Secanggih dan sehebat apapun proyek yang dikerjakan jika tidak memberikan dampak perubahan positif pada masyarakat hal itu menjadi sia-sia. Masyarakat harus dirangsang agar bisa memiliki inisiatif untuk ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah proyek. Tingkat partisipatif masyarakat harus dibangun. Begitu pikir sejumlah *champion*.



Ada perbedaan mendasar antara fasilitator proyek dengan fasilitator masyarakat. Fasilitator proyek hanya memastikan proyek pembangunan benar terealisasi di lapangan. Sementara sebagai fasilitator masyarakat, juga perlu menyatu dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan merangsang mereka terlibat dalam pembangunan.

Melayani dengan Hati

Layaknya ungkapan, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Pandangan ini pula yang diejawantahkan oleh sejumlah inspirator pembangunan air minum dan sanitasi. Mereka tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, namun terlebih dulu memulai sebuah keberhasilan dari usaha mereka sendiri. Sejumlah inspirator itu diantaranya adalah Ellena Rachmawati, Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil meyakinkan masyarakat

bahwa perubahan harus dimulai dari mereka sendiri.

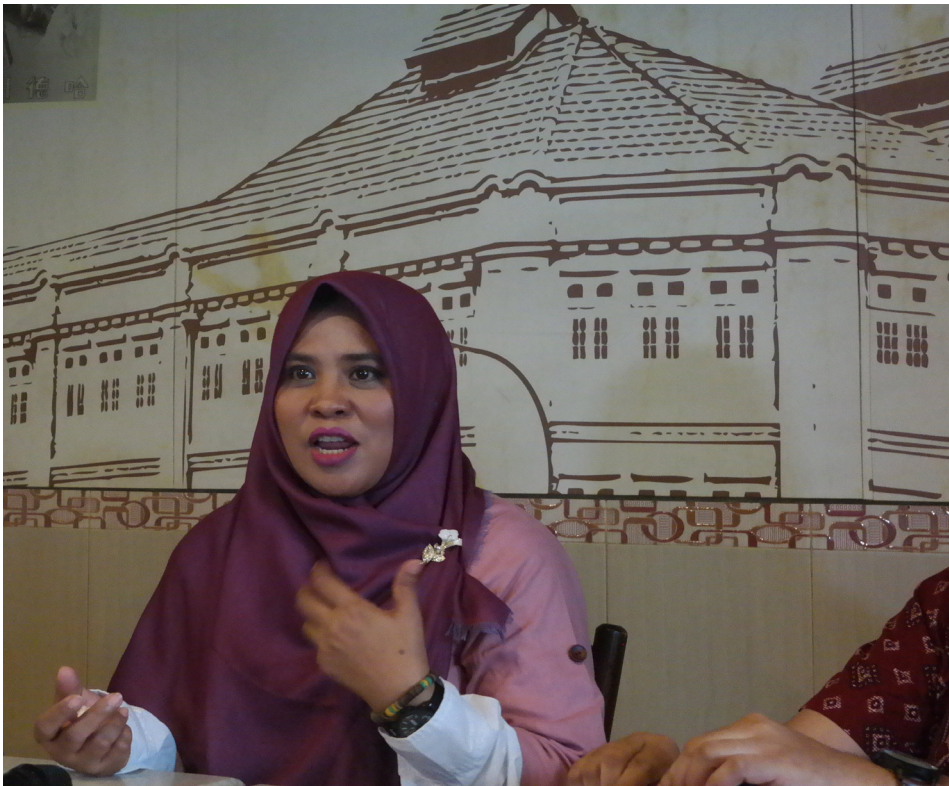
Wanita yang berpengalaman mengerjakan sejumlah proyek ini mengaku bahwa pada awalnya dia sempat menganggap peran masyarakat kurang penting dalam sebuah program pembangunan. Hal terpenting menurutnya saat itu adalah ketersediaan dana, baik dari lembaga donor ataupun dari pemerintah. Tidak heran jika pada periode awal YMP NTB berdiri pada tahun 2000, Ellena cenderung menjalankan sebuah program dengan pendekatan *project oriented*. Dia hanya benar-benar memastikan bahwa proyek yang diprogramkan oleh lembaga donor atau pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Saat itu dia tidak memberikan perhatian pada peran serta masyarakat dalam pembangunan. Yang menjadi tolak ukur Ellena saat itu hanya apakah pembangunan (terutama pembangunan fisik) sudah selesai dilakukan apa tidak. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut, yang penting proyek bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi tanpa peran masyarakat proyek tersebut tidak akan mempunyai kesinambungan yang baik. Selain itu, pendekatan proyek hanya akan membuat masyarakat menunggu dan tidak memiliki inisiatif untuk pembangunan daerah mereka sendiri.

“Jadi saya masih betul-betul membawa proyek dari luar untuk kemudian datang ke desa. Dulu arogansi saya sebagai orang luar itu sangat kental. Saya bangga datang ke desa dan mengatakan saya Ellena. Saya dari kedutaan besar ‘A’ atau dari lembaga donor ‘B’, kami membawa uang untuk melakukan sebuah pembangunan. Spanduk proyek pun terpampang di desa atau daerah yang menjadi lokasi proyek,” begitulah kisah Ellena ketika pertama kali turut berkecimpung di bidang pembangunan masyarakat.

Ellena melihat bahwa cara kerja fasilitator proyek sebenarnya disukai masyarakat. “Masyarakat dan kepala desa senang

menerima kami. Namun ternyata mereka senang dengan saya dan lembaga kami karena mereka melihat ada uang dibalik kedatangan kami,” tambah Ellena.

Awalnya Ellena tidak menyadari hal itu. Baru pada 2004 dia betul-betul sadar ada yang salah selama ini. Kisahnya bermula ketika sedang mendampingi beberapa LSM dan mengajarkan beberapa metodologi. Salah satunya tentang pemahaman partisipatif kondisi pedesaan (*participatory rural appraisal/ PRA*). Dia juga mengajari masyarakat tentang bagaimana membuat peta yang bagus. Saat itu datang seorang lelaki



bernama Nobuaki Wada, salah satu penulis buku “Menyingkap Realitas Lapangan Meta-Fasilitas Bagi Pekerja Pembangunan Masyarakat” yang juga sering mengisi pelatihan yang diikuti oleh para fasilitator di Indonesia. Ellena yang kemudian menggagap Wada sebagai gurunya itu mengajukan beberapa pertanyaan sederhana.

Wada bertanya, sudah berapa lama Ellena tinggal di desa ini? Ellena pun menjawab hampir satu setengah tahun. “Dia kemudian bertanya lagi. ‘Siapa pemilik lahan ini? Kemudian ada pertanyaan satu lagi, sumur ini dalamnya berapa?’ cerita Ellena.



FOTO: POKJA AMPL NASIONAL

Ellena Rachmawati (tengah)
sedang presentasi kegiatan
YMP NTB

Ellena tidak bisa menjawab dua pertanyaan tersebut. “Kamu bukan fasilitator rakyat. Kamu hanya fasilitator proyek, karena tidak pernah tahu keinginan masyarakat yang sebenarnya,” kata Ellena menirukan ucapan Wada.

Sejak saat itu Ellena menyadari bahwa ada yang kurang dari apa yang dia lakukan selama ini. Peristiwa itu akhirnya mengubah gaya kerja Ellena untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dia merasa harus memahami semua seluk beluk masyarakat, bukan hanya memahami seluk beluk proyek. “Saya lebih menyukai peran sebagai fasilitator masyarakat. Spirit fasilitator masyarakat adalah tanpa uang, tanpa proyek kita masih tetap bisa bekerja di masyarakat, dan meyakini bahwa uang akan datang ketika keringat keluar dengan baik dan benar,” ujar Ellena.

Setelah melakukan pendekatan yang lebih intens dengan masyarakat, Ellena pun melihat hasilnya berbeda. Pembangunan bisa cepat dilakukan dan berkelanjutan. Kisah Ellena menjadi sebuah pembelajaran, bahwa masyarakat ketika dilibatkan secara benar akan menjadi bagian dari sebuah program tanpa harus melihat iming-iming keberadaan dana terlebih dahulu. Satu hal terpenting, saat masyarakat menjadi bagian dari proyek tersebut, maka hasil yang didapat adalah rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tumbuh secara alami, bukan dipaksakan apalagi karena embel-embel uang.

Jihad Sanitasi

H. Bahrudin, Ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Desa Gumukmas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung mengajak peran masyarakat melalui mimbar-mimbar pengajian. Bahrudin mengajak masyarakat dengan cara cukup unik, yaitu mengajarkan jihad. Tapi jangan dulu memvonis bahwa jihad yang disampaikan Bahrudin identik

dengan menghunus pedang atau mengangkat senjata. Tapi, jihadnya melawan gaya hidup tidak sehat. Caranya, mengajak warga di sekitar tempat tinggalnya untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan (BABS). Sebab, sejatinya, Islam sebagai agama yang dianut Bahrudin jelas-jelas mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.

Bahrudin pun memberikan pemahaman jihad dalam bentuk lain, yakni peduli kepada kebersihan lingkungan sekitar. Sebenarnya, sebagai pemuka agama, Bahrudin awalnya juga tidak terlalu memperhatikan masalah BABS dan buang sampah sembarangan di lingkungannya. Dalam memberikan pemahaman ajaran agama, Bahrudin selalu mengajarkan *thaharoh* (hal tentang bersuci yang ada dalam syariat Islam). Dia saat itu hanya menitikberatkan pada hal bersuci atau membersihkan diri setelah membuang hajat. Seperti membersihkan diri saat selesai buang air besar (BAB) atau bersuci dari hadas kecil maupun besar. "Saya saat itu jarang menyinggung tentang kegiatan saat buang air itu sendiri, baik buang air besar maupun kecil," kisah Bahrudin.

Sebagaimana dai lain, Bahrudin saat itu masih melihat bahwa buang air tidak mempunyai porsi yang banyak dalam kitab fiqih dibanding bersuci. Tindakan buang air kadang dianggap tidak mempunyai relasi langsung dengan sah atau tidaknya ibadah seseorang. Berbeda dengan bersuci, seperti wudhu dan mandi junub yang mempunyai korelasi langsung dengan sah atau tidaknya seseorang dalam melakukan ibadah. Adanya anggapan bahwa adab buang air besar tidak berhubungan langsung dengan ibadah ini membuat sejumlah umat muslim juga menganggap BABS bukan sebuah kegiatan yang negatif. Akibatnya, Bahrudin saat itu melihat sekitar 50% warga di desanya, yang mayoritas muslim, masih BABS. Mereka menggunakan lahan kosong untuk kegiatan buang hajat besar. Bahkan sebagian menjadikan kolam ikan lele dan sungai sebagai



tempat “favorit”. Parahnya lagi, kebiasaan ini berlangsung secara turun temurun dan seakan sudah menjadi “budaya” yang sulit diubah.

BABS pun dianggap sebagai kegiatan lumrah yang tidak berdampak buruk. Pemahaman ini pun sudah tertanam dalam diri di hampir seluruh masyarakat desa Bahrudin tinggal. Dia pun mengaku tidak terlalu menyinggung soal kebiasaan buruk itu



FOTO: EKA NICKMATULHUDA

H. Bahrudin konsisten
menyerukan pentingnya hidup
sehat dan bersih dalam setiap
dakwahnya

dalam setiap ceramah dan pengajian yang dilakukannya.

Namun, setelah mengikuti pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Bahrudin baru menyadari kekurangannya. Sebagai pemuka agama, dirinya kurang memberikan pemahaman tentang arti pentingnya buang air besar secara benar. Hal ini disebabkan dalam pelatihan STBM, Bahrudin mendapat gambaran nyata tentang bahaya BABS, baik bagi

lingkungan maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Ternyata BABS bisa merusak kesehatan dan menimbulkan lingkungan yang kotor.

Bahrudin pun menyadari bahwa perilaku BABS maupun dampak BABS sangat bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Selama ini dia menilai ada yang terlupakan dalam menyampaikan materi *thoharoh* kepada umat, yaitu tentang larangan BABS. Padahal larangan itu nyata dalam teks agama. Dari sinilah Baharuddin mulai menyadarkan masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat melalui ceramah dan pengajian yang dia lakukan. Bahrudin melakukan pendekatan agama dalam menyadarkan masyarakat agar tidak lagi BABS.

Tidak cukup hanya dengan menyampaikan dalil agama, usaha menyadarkan masyarakat harus terus dilakukan dalam forum-forum kemasyarakatan. Sebab mengubah kebiasaan yang sudah dianggap sebagai budaya dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hidup bersih tak semudah membalik telapak tangan.

Tidak hanya dalam ceramah Bahrudin memberikan pengertian tentang pentingnya hidup sehat. Dia pun kerap berkeliling menyambangi masyarakat. Malah setiap Minggu pagi dia menggelar “jihad” yang merupakan kependekan “ngaji hari ahad”. Kegiatan ini pun mendapat dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Bahkan, Bupati Pringsewu H Sujadi sering ikut “berjihad” ala Bahrudin ini.

Bahrudin benar-benar mempraktikkan arti jihad yang sebenarnya dalam masyarakat. Baginya, jihad bukanlah semata-mata bermakna harus turun ke medan perang dan memanggul senjata atau menghunus pedang. Jihad yang sesungguhnya adalah melawan kedzoliman, melawan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat yang salah satunya adalah BABS yang jelas-jelas

dilarang agama. Harus ada jihad untuk memerangnya.

Dalam pandangan Bahrudin, BABS merupakan sebuah perilaku dzolim kepada masyarakat karena bisa menimbulkan beragam penyakit. Selain itu, BABS ini sama artinya dengan mendzolimi diri sendiri, karena pelaku BABS adalah orang yang paling berpeluang tertular penyakit infeksi dari bakteri E-coli.

Bahrudin bersyukur, karena berkat usahanya, kini sudah banyak masyarakat yang meninggalkan kebiasaan BABS. Masyarakat kini bergairah membangun jamban sehat. Apalagi tim STBM telah memberikan cara membuat jamban sehat dan murah. "Hanya dengan Rp 850 ribu, masyarakat bisa membangun jamban sekaligus tangki septik yang sehat," jelas Bahrudin.

Saat ini beberapa desa di Kecamatan Pagelaran siap-siap mendeklarasikan *Open Defecation Free* (ODF), kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tak lagi BABS. Pada akhir Desember 2015 direncanakan enam desa (dari 22 desa yang ada) di Kecamatan Pagelaran akan mendeklarasikannya. Keenam desa tersebut adalah Puji Harjo, Gemah Ripah, Patoman, Padangrejo, dan Luwu Sari.

Kendati begitu Bahrudin tidak lantas puas dengan keberhasilannya menanamkan hidup sehat di tengah masyarakat. Dia mengaku akan terus berjihad hingga lebih banyak lagi masyarakat yang meninggalkan kebiasaan BABS. Dengan memekikkan Allahu Akbar!, Allahu Akbar!, Allahu Akbar!, dia bertekad *lillahi ta'ala* (hanya karena Allah) akan memerangi kebiasaan buruk masyarakat agar tak lagi buang air besar sembarangan. Bahrudin akan selalu menanamkan pemahaman bahwa jihad bisa diterapkan dalam bidang apapun. Masyarakat bisa memaknai jihad sebagai segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan syariat agama dalam pemberantasan kezoliman baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat.

Di jihad ala Bahrudin ini, dia memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa buang air di jamban yang sehat juga bagian dari perintah agama, karena adab (tata cara) buang air atau dalam bahasa fiqh disebut *istinja'* sudah diatur sedemikian rupa, seperti tidak boleh ditempat terbuka dan lainnya. Hal itu berulang-ulang dia sampaikan dalam ceramahnya.

Bahrudin juga menyerukan bahwa tidak sedikit teks agama baik itu yang bersumber dari wahyu Tuhan (Al-Qur'an), maupun sabda Nabi Muhammad SAW (Hadis), serta kebiasaan baik umat muslim (berupa doa-doa sehari-hari) yang secara nyata menganjurkan untuk menghindari mereka dari kotoran. Intinya, umat diminta untuk selalu bersih. Tidak hanya bersih saat beribadah, namun juga dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Quran surat Al Baqarah ayat 222 misalnya, Allah secara tegas berfirman "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri." Sementara itu dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Kebersihan itu sebagian dari iman". Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa seseorang tidak boleh buang air di air yang sedang mengalir. Maksud air yang sedang mengalir di sini bisa diartikan sebagai sungai, kali atau kolam," kata Bahrudin.

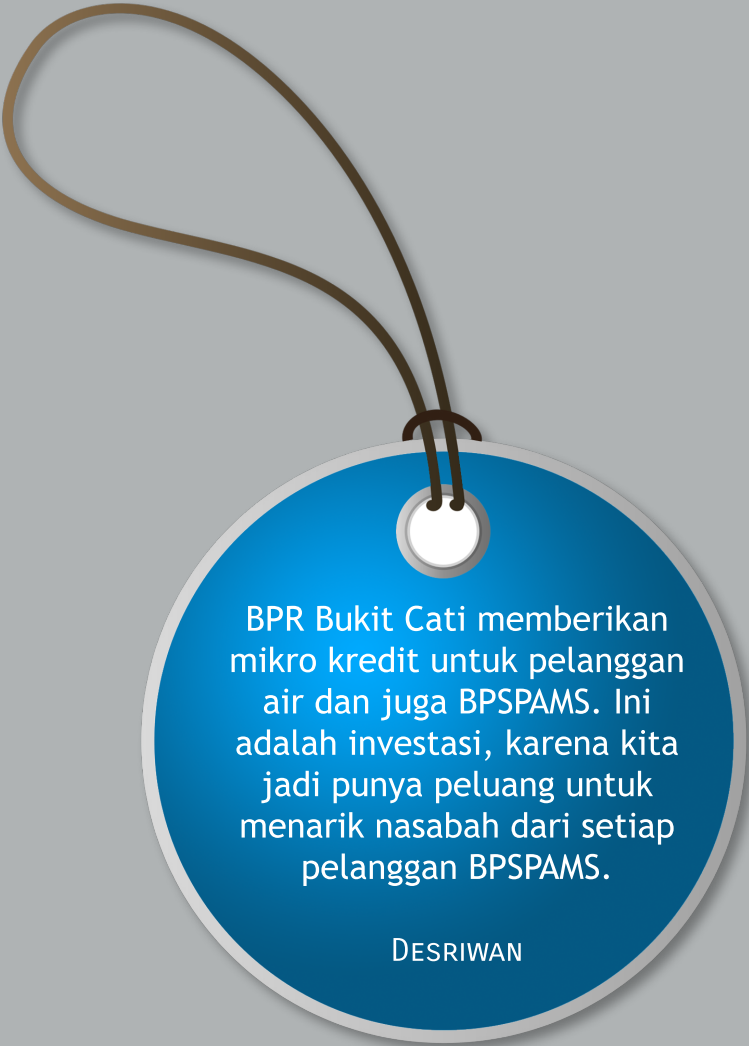
Dalam tradisi sehari-hari, seorang muslim juga diperintahkan untuk selalu berdoa saat masuk-keluar toilet dengan doa yang artinya "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan dan kotoran." Doa ini mencerminkan bahwa buang air besar menciptakan kotoran yang mesti dihindari. Doa ini jelas tidak sesuai dengan kebiasaan BABS, karena kotoran hasil BABS bisa membuat orang tidak terlindung. Sebab, ada banyak penyakit dari kotoran tersebut yang bisa menyerang manusia.

Mayoritas umat Islam mengetahui isi Al-Qur'an dan hadis

mengenai pentingnya kebersihan, namun karena kurangnya penitikberatan hal kebersihan membuat mereka abai dan tetap melakukan BABS. Perilaku BABS ini bukan karena mereka tidak mempunyai uang untuk membangun jamban sehat. Terbukti banyak yang sudah mampu secara materi, namun tetap saja melakukan BABS. Namun, hal itu bukan menjadi kendala bagi Bahrudin untuk tetap menggaungkan pentingnya buang air besar dengan benar melalui pendekatan agama. Terbukti, saat ini masyarakat di lingkungannya perlahan mulai meninggalkan kebiasaan buruk BABS.

Bahrudin menyarankan agar ahli agama dan penceramah tidak hanya menguasai teks kitab suci, tapi juga diiringi dengan pengetahuan penunjang, seperti pengetahuan tentang kesehatan. Sehingga anjuran agama bisa lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu merespon problem yang ada.

Guna mempermudah penyampaian pesan, Bahrudin menggunakan alat peraga baik berupa video atau gambar untuk menggambarkan tentang bahaya buang air besar sembarangan atau buang air besar yang tidak sesuai dengan ajaran di adab buang air dalam Islam. "Saya misalnya memperlihatkan WC yang ada di tengah kolam, atau kondisi sanitasi yang buruk. Serta bahaya-bahaya yang diakibatkannya," katanya.



BPR Bukit Cati memberikan mikro kredit untuk pelanggan air dan juga BPSPAMS. Ini adalah investasi, karena kita jadi punya peluang untuk menarik nasabah dari setiap pelanggan BPSPAMS.

DESRIWAN

4 | Solusi Cerdas para Direktur

Menduduki kursi empuk di sebuah perusahaan tentu saja menjadi dambaan semua orang. Seorang direktur, manajer atau apapun namanya, jika sudah berada di atas kursi empuk, banyak yang kurang memperhatikan peran sosial mereka, khususnya kepada masyarakat kecil. Yang penting, posisi sudah nyaman dan aman serta bisa mendapatkan keuntungan besar bagi perusahaan.

Namun pemikiran ini tidak dianut oleh beberapa sejumlah pimpinan perusahaan. Bagi mereka, keuntungan saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sudah bekerja dengan baik. Lewat jabatan yang dipegang, mereka ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat. Perusahaan yang mereka pimpin diarahkan untuk menghasilkan sebuah produk atau kebijakan

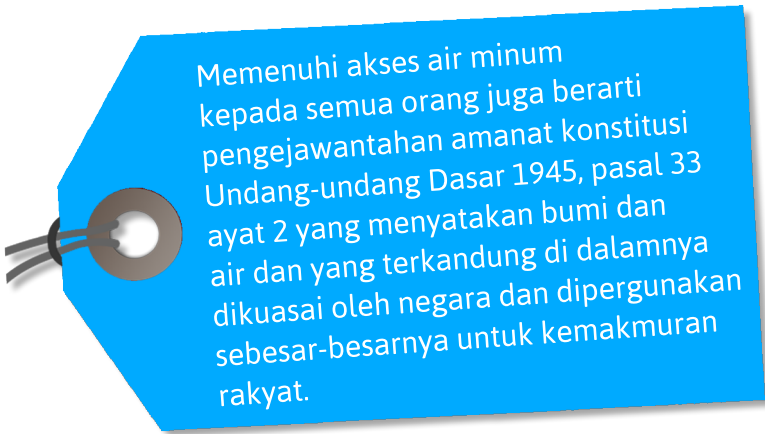
yang mampu dinikmati oleh masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian. Hal ini hanya bisa dilakukan jika mereka tidak hanya memikirkan sisi bisnis semata, namun juga memikirkan sisi kemanusiaan.

Apalagi, jika perusahaan yang mereka pimpin adalah perusahaan yang bergerak di bidang air minum. Air minum sebagai kebutuhan utama manusia, harus bisa dinikmati oleh semua, baik itu mereka yang miskin, kaya, hidup di rumah mewah, atau mereka yang tinggal di gubuk kecil di pinggiran kota. Memenuhi akses air minum kepada semua orang juga berarti megejawantahkan amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Melayani yang 'Ilegal' tanpa Melanggar Hukum

Masyarakat yang hidup di permukiman padat penduduk dan wilayah kumuh, sering mengeluarkan biaya yang lebih mahal demi mendapatkan air minum untuk keperluan sehari-hari. Gambarnya, mereka harus membayar Rp 3.000 untuk membeli satu jeriken air berisi sekitar 25 liter dari pedagang air keliling. Artinya, mereka harus membayar Rp 120.000 untuk satu meter kubik (1.000 liter) air. Angka ini jauh lebih mahal dibandingkan harga air yang dijual Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) manapun.

Keterbatasan akses pada sumber air serta belum adanya jaringan perpipaan PDAM, membuat masyarakat harus mencari cara lain mendapatkan air. Membeli dari pedagang keliling menjadi satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan air. Tentu saja, biaya untuk membeli air menjadi beban hidup tambahan bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan pas-



pasan dan tinggal di wilayah kumuh.

Di samping itu permukiman kumuh di kota besar banyak menempati tanah yang bukan milik sendiri. Para penduduk tidak memiliki surat legal atas tanah yang mereka tempati. Hal ini menambah rumit permasalahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk air minum, karena bisa saja pemerintah daerah setempat enggan membuat jaringan perpipaan di daerah "liar" tersebut.

Tapi tidak demikian bagi PAM Jaya. Siapapun rakyat Indonesia, kendati mereka tinggal di tanah ilegal tetap perlu disediakan air dengan harga terjangkau. Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat, berusaha tetap memberikan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tempat tinggalnya tidak dilalui perpipaan, terutama di pemukiman ilegal. Layanan ini diwujudkan dengan menghadirkan program Master Meter induk yang dipasang di luar kawasan ilegal. Masyarakat bisa membangun jaringan perpipaan sendiri agar air dari meter induk bisa sampai pada pemukiman mereka. Harganya pun sangat



terjangkau yaitu berkisar Rp 10 ribu sampai Rp 14 ribu per kubik. Penetapan tarif ini juga berdasarkan musyawarah dengan warga di kawasan kumuh. Bagi mereka, harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan beli eceran melalui pedagang yang tidak kurang dibutuhkan Rp 120 ribu per kubik.

Master meter merupakan solusi temporer. Walaupun begitu,



FOTO: ROY RUBIANTO

Erlan Hidayat di tengah fasilitas milik PDAM yang dipimpinnya

solusinya ini tidak akan pernah sia-sia. Keberadaan master meter bukan berarti melegalkan keberadaan permukiman liar. Ini hanya solusi bagi mereka yang kebetulan kurang beruntung tinggal di kawasan kumuh, sebab bagaimana pun mereka membutuhkan air untuk semua aktivitas sehari-hari. Semua orang berhak mendapatkan air.

Di samping adanya master meter untuk kawasan kumuh, PAM Jaya juga memberlakukan tarif murah bagi masyarakat kurang mampu yang daerahnya masuk dalam jaringan perpipaan. Tarif bagi warga kurang mampu di Jakarta hanya sebesar Rp 1.050 per kubik. Rata-rata harga air di Jakarta sebesar Rp 7.600 per kubik, namun PAM Jaya tidak menjual air dengan harga rata-rata. Berlaku tarif progresif bagi tempat-tempat komersial seperti hotel, rumah makan, restoran, hingga pelabuhan. Untuk hotel tarif per kubik air sebesar Rp 12.500. Sementara tarif terbesar ada di pelabuhan yaitu sebesar Rp 14.000 per kubik. "Itulah yang disebut konversi subsidi silang," jelas Erlan.

Kredit Simbiosis Mutualisme

Lembaga keuangan seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) juga bisa berkontribusi pada peningkatan akses air minum dan sanitasi. Caranya adalah dengan menerapkan skema kredit untuk membangun sarana yang berhubungan dengan dua kebutuhan dasar tersebut.

Hal inilah yang dilakukan BPR Bukit Cati Pematang Panjang, Sumatera Barat. Sejak 2013, BPR tersebut memberikan perhatian besar pada kredit peningkatan akses air minum.



Integrasi Pengolahan Air dan Limbah

Dirut PAM Jaya, Erlan Hidayat, saat ini sedang melakukan upaya untuk integrasi pengolahan air minum dan limbah, karena pada dasarnya dua hal ini tidak bisa terpisahkan.

Erlan menyebutkan, bahwa penyediaan air harus terintegrasi dengan pemanfaatan kembali air yang sudah dipakai. Pada

Bukan tanpa alasan BPR Bukit Cati Pematang Panjang menerapkan skema kredit semacam ini. Maklum, sebelumnya, warga Nagari Pematang Panjang, Kabupaten Sijunjung yang mempunyai daerah hijau dan makmur mengalami kesulitan mengakses air karena daerah yang berbukit. Akhirnya, sebagian besar masyarakat membeli air dari depot dengan harga Rp 100 ribu untuk waktu pemakaian relatif dua minggu.

Sementara itu, fasilitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dikelola Badan

dasarnya, air untuk konsumsi dan limbah air berasal dari sumber yang sama. Pengintegrasian dua layanan ini dilakukan dengan memadukan semua program kerja yang berhubungan dengan masalah air minum dan sanitasi dari hulu hingga hilir. Air buangan yang sudah terolah bisa menjadi sumber air untuk kembali diolah menjadi air siap konsumsi. Air buangan yang terolah juga akan membuat sungai menjadi lebih bersih, sehingga perusahaan air minum pun mendapatkan sumber air tambahan yaitu dari pengelolaan air buangan. Hal ini juga membuat biaya pengolahan menjadi lebih murah.

Dalam hal ini, PAM Jaya sebagai penyedia air perpipaan di Jakarta kini sedang melakukan proses penjajakan untuk penggabungan dengan PAL Jaya, yang juga merupakan BUMD dan bergerak pada sektor layanan pengolahan air limbah ibukota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan lampu hijau untuk pengintegrasian dua perusahaan yang dekat dengan hajat hidup masyarakat ini

Di sejumlah negara, integrasi pengolahan air minum dan limbah ini sudah banyak dipraktikkan dan berhasil.



FOTO : DWIANTO WIBOWO

Desriwan, Dirut BPR Bukit Cati, memberikan perhatian pada kredit sambungan fasilitas air minum

Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) belum mampu menunjang kebutuhan air minum masyarakat di Pematang Panjang. Kondisi itu membuat Desriwan, Direktur Utama BPR Bukit Cati berpikir untuk mencari terobosan pembiayaan agar masyarakat bisa meningkatkan akses air minum.

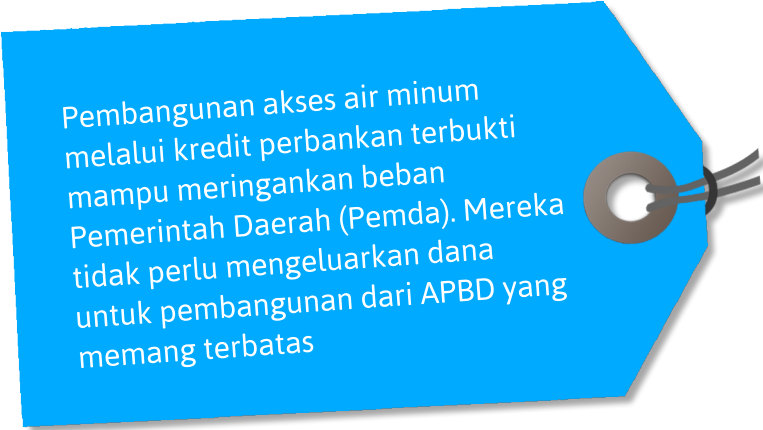
Beruntung pada 2013, *Water and Sanitation Program* (WSP) Bank Dunia memperkenalkan Program Mitra Prima yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan air minum perdesaan berbasis masyarakat melalui pinjaman dari lembaga keuangan. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Desriwan langsung melihat program ini sebagai solusi dan sangat menjanjikan.

Dia menilai, melalui program ini masyarakat bisa membangun sarana air minum dan sanitasi dengan mudah. Sementara BPR bisa mengakses pelanggan sekaligus membiayai BP SPAMS. Yang jelas, lewat program ini BPR bisa melayani individu atau rumah tangga, dan akan makin banyak yang bisa menjadi pelanggan. Mendapat peluang seperti ini, Desriwan mulai mempelajari kinerja BP SPAMS melalui Mitra Prima. Bahkan dia beberapa kali bertemu dengan pengurus BP SPAMS, termasuk melihat sarana, sistem pengelolaan, pelanggan, maupun potensi tambahan calon pelanggan. Rata-rata satu BP SPAMS baru melayani 30–40% penduduk nagarinya. Dapat dibayangkan berapa banyak potensi nasabah yang bisa datang. Pelanggan BP SPAMS juga bukan hanya dari individu, namun juga unit usaha kecil yang mengandalkan ketersediaan air seperti peternakan, cuci kendaraan, pabrik tahu, dan lainnya.

Sementara itu, bagi masyarakat akses kredit BPR akan menghindari mereka dari jeratan rentenir yang menerapkan bunga sangat tinggi. BPR Bukit Cati kemudian menyusun kriteria

calon nasabah, baik dari BP SPAMS maupun perorangan. Bagi BP SPAMS, agar bisa mengajukan pinjaman, mereka harus sudah berbentuk badan hukum. Di Sijunjung, ada kebijakan agar setiap desa memiliki badan usaha milik nagari dan seluruh pengurus BP SPAMS harus mengantongi Surat Keputusan dari Wali Nagari. Sebelum ada kebijakan BPR Bukit Cati, BP SPAMS terbilang sulit mendapatkan kredit. Tidak jarang untuk mendapatkan pembiayaan, para pengurus menjaminkan harta pribadi.

Tapi, melalui mikro kredit, BPR Bukit Cati menjamin, selama jenis usaha dan pertanggung jawaban pengurus jelas, mereka akan mudah mendapatkan kredit. Apalagi pihak BPR Bukit Cati melihat usaha BP SPAMS sangat jelas, berjualan air yang dibutuhkan semua orang. Desriwan dan pegawai BPR Bukit Cati kemudian membentuk tim kredit khusus air. Dari 60 BP SPAMS di Sijunjung, ada delapan yang mengajukan pinjaman ke BPR Bukit Cati, namun baru empat yang disetujui dengan total investasi mencapai Rp500 juta. Investasi ini dipergunakan untuk pembangunan tandon, penambahan jaringan perpipaan, dan meter air. Dari program ini BP SPAMS bisa menambah pelanggan



Pembangunan akses air minum melalui kredit perbankan terbukti mampu meringankan beban Pemerintah Daerah (Pemda). Mereka tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembangunan dari APBD yang memang terbatas

baru yang bakal berdampak pada bertambahnya nasabah BPR.

Pembangunan melalui kredit perbankan ini terbukti mampu meringankan beban Pemerintah Daerah (Pemda). Mereka tidak perlu mengeluarkan dana pembangunan dari APBD yang memang terbatas. Terlebih lagi proses pembangunan dengan biaya APBD membutuhkan waktu panjang, karena harus mendapatkan persetujuan DPRD terlebih dahulu

Melihat besarnya potensi pembangunan melalui skema kredit ini, BPR Bukit Cati mengundang Pemda untuk juga turut berperan. Misalnya dengan melakukan pembinaan agar semua BP SPAMS bisa sehat dan layak bank (*bankable*). Pemda bisa melatih BP SPAMS untuk menerapkan manajemen yang baik, melakukan penyesuaian tarif agar kas sehat, melatih membuat laporan yang bagus dan lainnya. "Saya sebenarnya sangat berharap Pemda juga melihat potensi ini. BP SPAMS yang sudah *bankable*, kasih ke kami, kami biyai. Sedangkan yang belum *bankable*, dibina oleh Pemda," harap Desriwan.

Contoh pelatihan yang bisa dilakukan Pemda misalnya dengan memberikan keleluasaan BP SPAMS untuk menentukan tarif yang benar sesuai dengan biaya produksi. Tarif masing-masing pelanggan bergantung pada banyak sedikitnya penggunaan. Bahkan jika perlu diberlakukan tarif progresif bagi mereka yang menggunakan air dalam jumlah banyak di atas rata-rata. BP SPAMS yang sehat pasti tidak akan memberlakukan tarif flat, atau semua pelanggan membayar sama berapapun jumlah pemakaiannya. Karena akan membuat mereka boros air dan BP SPAMS berpotensi merugi sehingga tidak mungkin *bankable*. Sebab, dengan tarif flat, pelanggan bisa saja membuka kran air selama 24 jam, karena mereka tidak merasa terbebani biaya tambahan. Tarif flat juga bisa menghilangkan *sense of belonging* (rasa memiliki) masyarakat atas air yang mereka dapatkan dengan

muah. Tanpa bimbingan Pemda, BP SPAMS juga sebenarnya bisa memulai untuk memperbaiki manajemen mereka, baik dari segi operasional, menentukan tarif, hingga laporan agar bisa masuk kategori *bankable*.

Cara lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan BPR dengan cara memberikan subsidi bunga bagi masyarakat yang akan meminjam uang untuk keperluan penyambungan pipa ke rumah. Pemda bisa mensubsidi bunga 0,67%-1% dari beban bunga yang ditanggung konsumen. Saat ini besar bunga untuk tarif perorangan sebesar 1,67% per bulan. Jika ada subsidi pemerintah, masyarakat bisa lebih ringan.

Untuk melakukan penyambungan baru, biaya yang dikeluarkan masyarakat beragam. Ada yang sampai Rp5 juta untuk menyediakan instalasi perpipaan ke rumah mereka, termasuk biaya pemasangan jaringan dari BP SPAMS. Dana sebesar itu merupakan kredit dari BPR Bukit Cati dengan jangka waktu pelunasan yang beragam tergantung kemampuan.

Subsidi kredit juga bisa diberikan untuk konsumen BP SPAMS, sehingga meringankan beban mereka. Subsidi ke BP SPAM jauh lebih ringan bagi Pemda dibandingkan apabila mereka membangun fasilitas instalasi air sendiri. Penyertaan modal pemerintah, baik berupa subsidi bunga dan lainnya untuk kredit sanitasi ini akan membuat peningkatan pembangunan akses air minum sangat tinggi. Dengan dana yang minimum, Pemda bisa mencapai peningkatan pembangunan yang sangat maksimum.

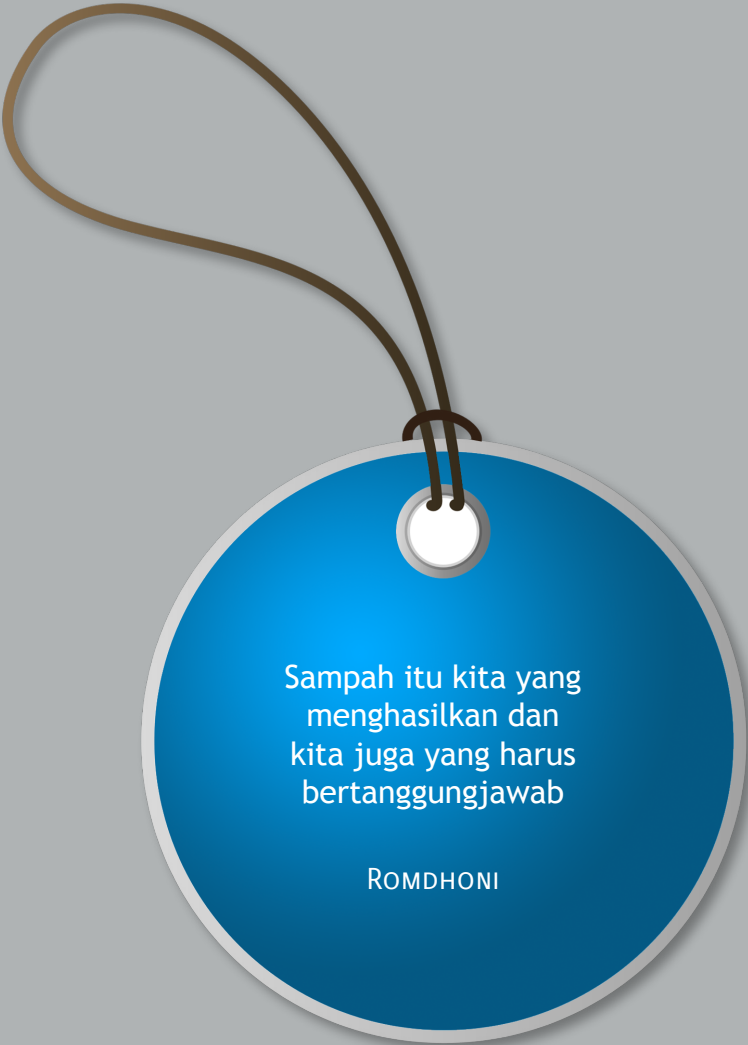
Inilah fungsinya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan. Intinya, sekecil apapun dana yang dialokasikan pemerintah melalui lembaga keuangan akan berdampak maksimal bagi pembangunan air minum. Bisa dipastikan alokasi itu tepat sasaran karena langsung menyentuh objek yang dituju yaitu BP SPAMS dan masyarakat yang akan membangun instalasi

jaringan perpipaan air di rumah mereka.

Desriwan yakin, skema kredit yang ditawarkan dalam Program Mitra Prima ini akan mempercepat target akses universal di sektor air minum dan sanitasi. Sebab, jika melaksanakan pembangunan air minum dan sanitasi hanya dengan mengandalkan dana langsung dari APBD yang rata-rata terbatas, akan sulit tercapai, karena membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pemberian kredit sanitasi ini bisa dinilai sebagai terobosan yang brilian dalam pembiayaan pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Kredit ini membuat pembangunan air minum dan sanitasi bisa diwujudkan di banyak tempat. Memaksimalkan kredit BPR untuk ternyata juga sangat efektif dan bisa langsung pada target sasaran. Selain itu, pembangunan yang berawal dari permintaan pinjaman masyarakat merupakan wujud pemberdayaan sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan kebutuhan dasar mereka dalam hal pemenuhan akses air dan sanitasi. Minat masyarakat akan semakin besar untuk membangun sarana air minum dan sanitasi pribadi jika dimudahkan untuk mengakses kredit. Apalagi jika ada tawaran bunga rendah plus difasilitasi untuk bisa langsung berhubungan dengan PDAM atau HIPPAMS (Himpunan Pengguna Air Minum dan Sanitasi) yang merupakan penyedia layanan air minum.

Bagi BPR, kredit air minum dan sanitasi sebenarnya sangat menjanjikan, karena semua orang pasti membutuhkan dua hal tersebut. Sehingga secara naluri, masyarakat akan berusaha memenuhi kebutuhan dengan membangun sarana untuk mencapai akses air minum dan sanitasi. Jika dikelola dengan baik, kredit sanitasi akan menjadi simbiosis mutualisme, saling memberikan keuntungan kepada kedua pihak, masyarakat dan BPR itu sendiri.



Sampah itu kita yang
menghasilkan dan
kita juga yang harus
bertanggungjawab

ROMDHONI

5 | Mengubah Menjadi Lebih Bermanfaat

Sampah, hingga tempat pembuangan akhir (TPA) dianggap sebagai masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Jumlah sampah yang terus meningkat melahirkan banyak problem. Semua orang selalu menghasilkan sampah, namun hanya sedikit yang mau memberikan perhatian pada masalah yang ditimbulkannya.

Kesan kotor, bau, hingga menjadi sarang penyakit sering menghalangi orang untuk memikirkan sampah, apalagi mengolahnya. Tidak heran, jumlahnya kemudian menggunung. Beruntung, kini banyak tangan-tangan kreatif yang mau mengolah sampah menjadi barang yang bernilai. Mereka tidak hanya mengolah sampah sendiri, namun berhasil membuktikan bahwa sampah sebenarnya menguntungkan, sehingga mengundang orang lain yang terlibat. Semakin banyak sampah yang diolah, maka akan semakin sedikit yang terbuang yang

Kegiatan Sugeng Triyono dan
warga Kelurahan Semper
Barat Jakarta Utara memilah
sampah

artinya memperkecil masalah sampah di sekitar kita.

Tidak hanya menyelesaikan sampah di sekitar kita, di tangan orang kreatif dan pejabat yang peduli, TPA yang sebelumnya selalu menghadirkan masalah bagi lingkungan sekitar pun bisa diubah menjadi taman rekreasi. Tidak percaya? Datang saja ke Kapanjeng Kabupaten Malang, Jawa Timur.



FOTO : BS-KPL.BLOGSPOT.COM

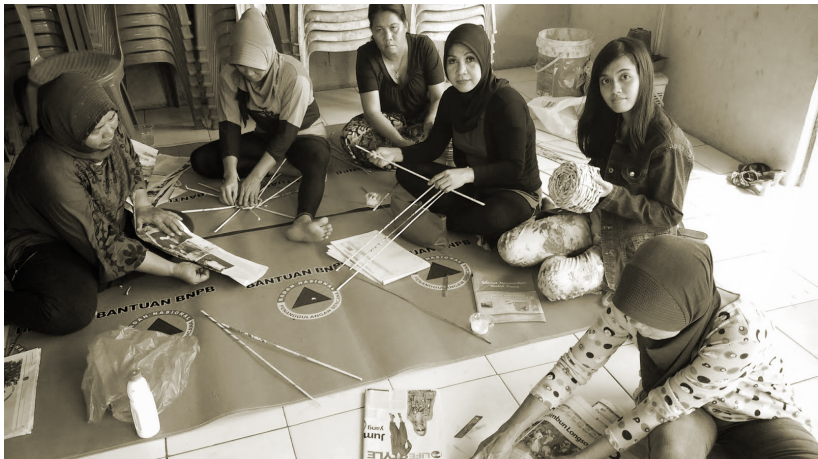




FOTO : BS-KPL.BLOGSPOT.COM

Mengolah Sampah Menjadi Uang

Bank sampah terbukti menjadi solusi efektif guna mengurangi sampah rumah tangga di sekitar kita. Menginisiasi bank sampah yang baik dan berkualitas sebenarnya bukan hal yang sulit, namun tetap juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini yang dilakukan Sugeng Triyono yang memprakarsai Bank Sampah Kenanga Peduli Lingkungan (BSKPL). Kini, bank sampah yang terletak di Kelurahan Semper Barat Cilincing Jakarta Utara itu telah menjadi percontohan.

Sugeng mengaku, pada mulanya sulit mengubah pola pikir masyarakat dalam melihat sampah. Apalagi, awalnya banyak masyarakat yang protes ketika Sugeng membangun bank sampah.

Mereka khawatir bank sampah hanya membuat lingkungan kotor dan bau. Sugeng harus berjuang keras meyakinkan bahwa sampah bisa menghasilkan uang jika dikelola dengan baik.

Lewat kerja keras dan pantang menyerah, akhirnya Sugeng mampu membuktikan bahwa tak ada barang percuma dari sampah. Kini, ada 2.122 KK di RW 04 Kelurahan Semper Barat yang menjadi nasabah BSKPL. Keberadaan BSKPL tidak hanya membuat sampah bisa terkelola dengan baik, namun juga membuat lingkungan lebih bersih. Tak ada lagi sampah di got.

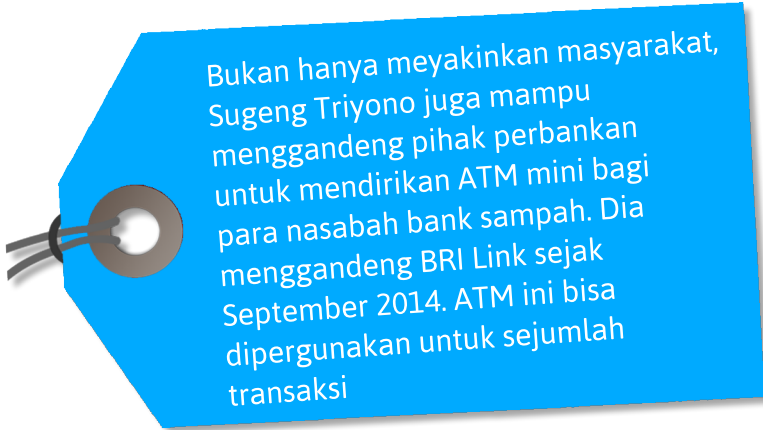
Bukan hanya meyakinkan masyarakat, Sugeng juga mampu menggandeng pihak perbankan untuk mendirikan ATM mini bagi para nasabah. Dia menggandeng BRI Link sejak September 2014. Dari kerjasama ini, kini di BSKPL ada ATM Mini yang dapat digunakan nasabah untuk membayar telepon, listrik, angsuran motor, M-Token, pembelian pulsa, dan layanan transfer. ATM Link ini bisa dipergunakan para nasabah, termasuk para lapak-lapak sampah yang bekerja sama dengan BSKPL. Ada lapak sampah khusus botol plastik seperti Lapak Marunda. Ada juga lapak campuran seperti Lapak Madura.

Hingga saat ini, BSKPL belum menerima sampah kantong plastik karena belum menemukan cara pengolahan yang tepat. Sebenarnya BSKPL sudah melakukan percobaan pengolahan limbah plastik dengan mesin pirolisis. Mesin tersebut dapat menghasilkan minyak, namun belum diketahui kualitas dan manfaat produk yang dihasilkan. Percobaan pengolahan plastik kresek ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas layanan dan menggandeng lebih banyak nasabah.

Upaya lain yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan buku tabungan yang terbukti menjadi daya tarik dan alasan utama warga ingin menjadi nasabah. Mereka bangga punya buku tabungan dan punya status “nasabah”.

Dalam waktu dekat, Sugeng yakin bisa merangkul semua warga RW 04 mengingat usaha yang dilakukan BSKPL terus berkembang dan layanannya pun semakin banyak. Seperti layanan gerobak keliling yang dapat langsung memberikan uang kepada warga yang membutuhkan uang cepat. Berbeda dengan bank sampah lain yang mengharuskan adanya minimal deposit di buku tabungan.

Tidak puas hanya menggandeng masyarakat umum, BSKPL juga dalam proses kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Semper Barat pada khususnya dan Cilincing pada umumnya. Tujuannya tentu saja memperluas manfaat dalam mengurangi timbunan sampah. Sugeng terus melakukan edukasi kepada guru, terutama dalam hal menyadarkan bahwa proyek ini lebih berorientasi pada lingkungan, bukan pada mendapatkan keuntungan besar. Sehingga jika kerjasama terjalin, maka yang diprioritaskan adalah penanganan sampah, bukan hanya berpikiran pada pembagian keuntungan.



Bukan hanya meyakinkan masyarakat, Sugeng Triyono juga mampu menggandeng pihak perbankan untuk mendirikan ATM mini bagi para nasabah bank sampah. Dia menggandeng BRI Link sejak September 2014. ATM ini bisa dipergunakan untuk sejumlah transaksi



FOTO: ARIF FADILLAH

Romdhoni di TPST
Mulyoagung Kabupaten
Malang

Sampah Semakin Banyak Dilirik

Sebuah kisah sukses bisa melahirkan kesuksesan lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kisah TPST Mulyoagung ini bermula pada 2010 silam dimana timbunan sampah di Kabupaten Malang mencapai 1.000 meter kubik per hari. Sampah-sampah itu tak terkelola dengan baik. Hanya sekitar 34% saja yang dikelola. Sisanya entah dibuang ke mana. Semestinya 100% sampah harus dikelola agar tidak menjadi sumber penyakit.

Melihat hal ini, beberapa warga mendirikan TPST dan secara perlahan menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) secara mandiri. Awalnya, pengelolaan sampah terkendala masalah anggaran yang terbatas. Lalu muncul ide untuk memberdayakan masyarakat agar mau mengelola sampah secara mandiri. Melalui model TPST 3R ternyata sampah yang tadinya dianggap sebagai barang tak berguna justru memiliki nilai ekonomi yang bisa menghasilkan uang, sehingga hanya sekitar 10-15% residu yang dibawa ke TPA.

“Uang hasil pengolahan sampah itu kemudian dijadikan dana operasional sebuah TPST. Di mana 60% biaya operasional ditunjang dari hasil sampah dan sisanya ditutup dari iuran warga. Lewat pola ini persoalan sampah di beberapa kawasan bisa diselesaikan. Selain itu, upaya ini juga mampu menciptakan lapangan kerja. Saat ini sudah ada lebih dari 50 TPST dan akan terus kami kembangkan,” ujar Romdhoni, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.

Saat ini TPST Mulyoagung mempunyai 80 karyawan yang digaji secara memadai setiap bulan. Dalam satu bulan, uang yang berputar di TPST bisa mencapai Rp125 juta per bulan. Tak heran jika pengelolaan TPST ini tidak lagi membutuhkan anggaran

APBD. Pengelolaan yang baik di tingkat hulu ini tentunya berdampak pada pengelolaan di hilir yakni TPA. Pengelolaan sampah di TPST 3R Mulyoagung pun mendapat pengakuan terbaik dari *United Nation Economic and Social Commission for Asia Pacific* (UN ESCAP) dan UCLA ASPAC. TPST Mulyoagung ini juga masuk dalam nominator untuk mendapatkan proyek model dari lembaga PBB.

Kini pengelolaan sampah seperti TPST Mulyoagung sudah

FOTO: PEMKAB MALANG



TPA Percontohan

Kisah sukses Kabupaten Malang dalam mengolah sampah juga terlihat dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Talangagung Kepanjen. TPA ini bahkan bisa menjadi sarana berekreasi keluarga.

Awalnya, TPA Talangagung tak ubahnya tempat pembuangan sampah di tempat lain. Bau tak sedap menyebar, sampah menggunung di mana-mana. Tapi kini, TPA Talangagung bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Malang. Bahkan sejak 2011 silam tempat ini dinamakan TPA Wisata Edukasi.

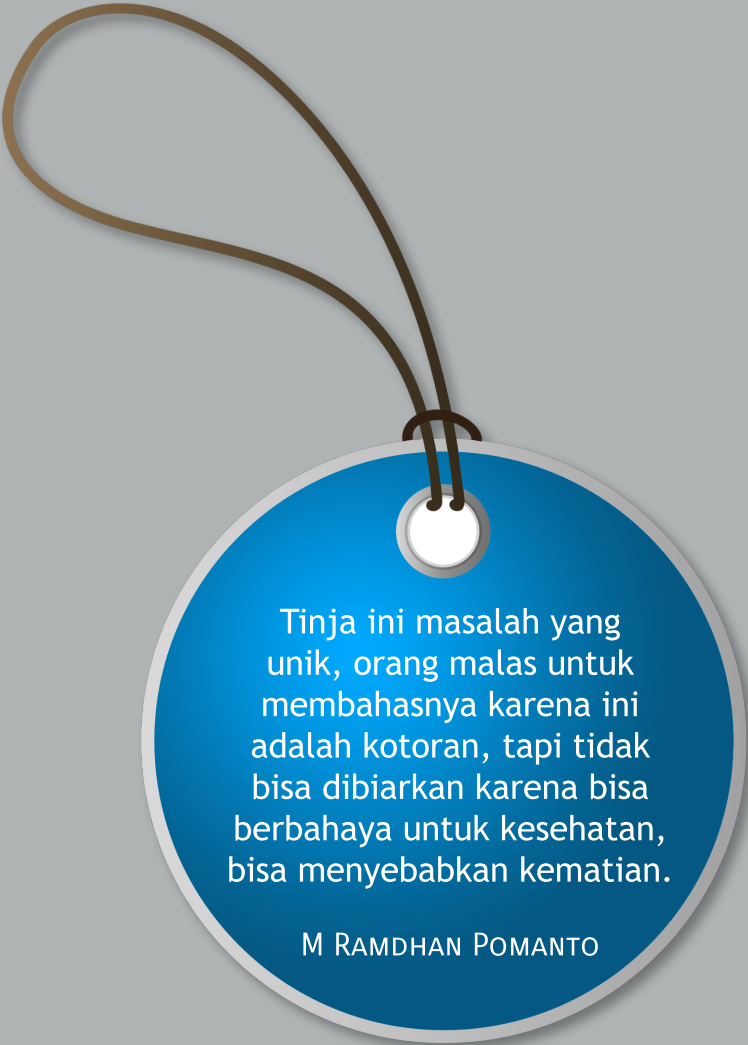
dilakukan di desa-desa lain di Malang seperti di Kecamatan Wagir, Singosari, dan lainnya. "Sudah banyak TPST yang tumbuh di Malang dengan skala beragam. TPST terbesar masih yang ada di Desa Mulyoagung dan ini menjadi percontohan," tambah Romdhoni

Tidak menutup kemungkinan, akan lahir TPST baru yang sukses seperti TPST Mulyoagung. Sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPA pun semakin sedikit.

Cara yang dilakukan pengelola TPA Talangagung diantaranya dengan pemanfaatan gas metana sebagai energi alternatif. Lewat cara ini, pandangan masyarakat yang tadinya mengira TPA adalah tempat yang jorok menjadi bersih dan asri. Yang tadinya bau menjadi wangi. Tempat yang tadinya banyak lalat disulap menjadi banyak burung dan kupu-kupu. Yang tadinya menjijikkan menjadi menarik. Tak ada kesan bahwa tempat ini panas. Yang ada justru sebaliknya, TPA Talangagung merupakan tempat yang sejuk dan layak disinggahi sebagai objek wisata.

"Alhamdulillah, saat ini TPA sukses menjadi tempat rekreasi masyarakat. Bahkan juga dapat digunakan untuk pertemuan-pertemuan formal atau informal berbagai lembaga. Ke depan kami masih mempunyai mimpi akan mengintegrasikan pengelolaan sampah dalam prespektif pengelolaan lingkungan dengan skala yang lebih besar," ungkap Romdhoni.

Inti dari metamorfosis TPA yang tadinya jorok menjadi asri terletak pada kemauan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, berinstropeksi bagaimana bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksi sendiri. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi penentu keberhasilan sebuah program yang sukses seperti TPA Talangagung.



Tinja ini masalah yang unik, orang malas untuk mem bahas nya karena ini adalah kotoran, tapi tidak bisa dibiarkan karena bisa berbahaya untuk kesehatan, bisa menyebabkan kematian.

M RAMDHAN POMANTO

6

Gebrakan

Pemimpin Lokal

Pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakatnya. Sudah seyogyanya seorang pemimpin memberikan contoh kepada masyarakat. Hal inilah yang dilakukan sejumlah pemimpin daerah di Indonesia, baik dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.

Kiprah mereka kadang tidak terekam di tingkat nasional, namun hasil yang diberikan nyata dan dirasakan oleh masyarakat mereka. Kesuksesan mereka diantaranya dalam bentuk mengurangi jumlah orang BABS (Buang Air Besar Sembarangan), menerapkan sistem pembuangan air limbah yang baik melalui LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal), hingga membangun PDAM dan menyediakan air bagi masyarakat sepanjang musim.

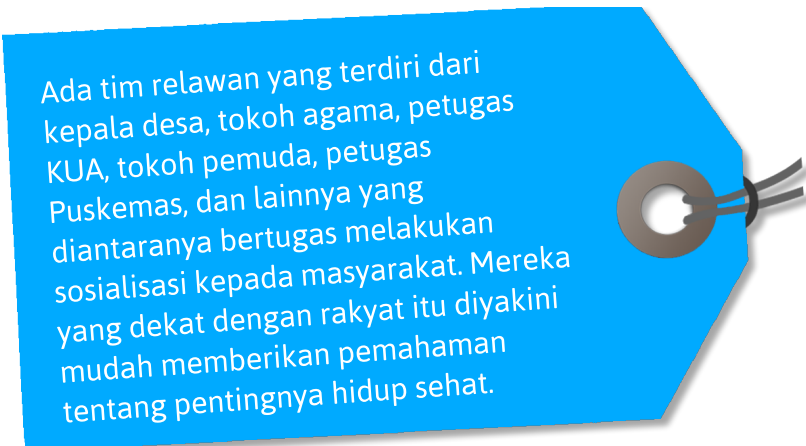
Dalam menyukseskan semua agenda dan target, mereka mempunyai strategi tersendiri. Semua strategi yang dijalankan disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang ada dan tentunya kerjasama dengan semua pihak.

Memerangi BABS dari Segala Penjuru

Dalam skala tertentu pemerintah bisa membangun infrastruktur untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat. Namun pembangunan saja tidak bisa untuk mengubah perilaku. Hal ini sangat disadari oleh Charlly R. Fischer, Camat Soppeng Raya, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

Saat pertama kali menjabat sebagai Camat, Charlly mengaku masih sering melihat masyarakat buang air besar sembarangan (BABS). Ada yang BAB di sungai, sawah, dan tempat terbuka lainnya. Perilaku tidak sehat ini bukan hanya berbahaya bagi lingkungan, namun juga bagi diri mereka. Namun tidak mudah memberi pengertian kepada masyarakat, apalagi jika mereka belum merasakan akibatnya.

Maka untuk meningkatkan akses sanitasi, dia berusaha menumbuhkan kesadaran pada diri masyarakat. Caranya, Charlly membuat tim relawan yang terdiri dari berbagai komunitas.



Ada tim relawan yang terdiri dari kepala desa, tokoh agama, petugas KUA, tokoh pemuda, petugas Puskesmas, dan lainnya yang diantaranya bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka yang dekat dengan rakyat itu diyakini mudah memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup sehat.

Kepala desa, tokoh agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh pemuda, petugas Puskesmas, Babinsa dan lainnya menjadi pilar-pilar pembangunan kesadaran masyarakat. Charlly yakin, jika semua elemen terlibat akan mempermudah kampanye Bebas BABS. Masyarakat juga akan mudah mendapatkan pemahaman yang benar tentang manfaat BAB tempunya bagi mereka, keluarga, dan seluruh warga desa.

“Saya ingin semua elemen membicarakan tentang sanitasi setiap hari. Ini bisa menjadi *shock therapy* untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk beralih kepada perilaku positif yaitu tidak BABS dan memiliki jamban sehat,” jelas Charlly.

Menurut Charlly, tim relawan sanitasi yang direkrut layaknya sebuah program multilevel marketing (MLM). “Kerja tim relawan sanitasi itu kita sebut dengan MLA (Multi Level Amalia). Sempel, ikhlas, dan sederhana,” ujar Charlly.

Jumlah relawan tidak kurang dari 30 orang. Tidak ada organisasi resmi yang menghimpun mereka, namun mereka terus bergerak dan menyadarkan masyarakat layaknya sebuah skema MLM. Berkat kerja keras tim relawan sanitasi, sekarang sudah ada dua desa yang bebas buang air besar sembarang yaitu Desa Kiru-Kiru dan Desa Paccekke. Dari 4.333 KK yang ada, hanya tersisa 492 KK yang masih buang air besar sembarangan.

Charlly menyebutkan, pihak pemerintah kecamatan bisa saja membangun sejumlah jamban untuk masyarakat. Namun hal ini tidak bisa menjadi jaminan akan mengubah perilaku BABS. Dia sadar, perilaku atau kebiasaan hanya bisa dilawan dengan kebiasaan, tidak hanya dengan pembangunan fisik. Dia bersyukur saat ini ada beberapa desa yang sudah deklarasi bebas BABS (*Open Defecation Free/ODF*). “Kalau satu atau dua desa Bebas BABS itu biasa, namun jika satu kecamatan ODF itu prestasi yang luar biasa,” tambah Charlly.

Membangun dari Lorong

Masalah selain BABS yang sangat berdampak pada akses sanitasi adalah sistem pengolahan limbah tinja. BAB di kakus saja tidak cukup, perlu pengolahan limbah yang standar agar tetap membuat lingkungan sehat.

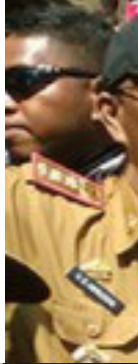


FOTO: IUWASH



FOTO: ISTIMEWA

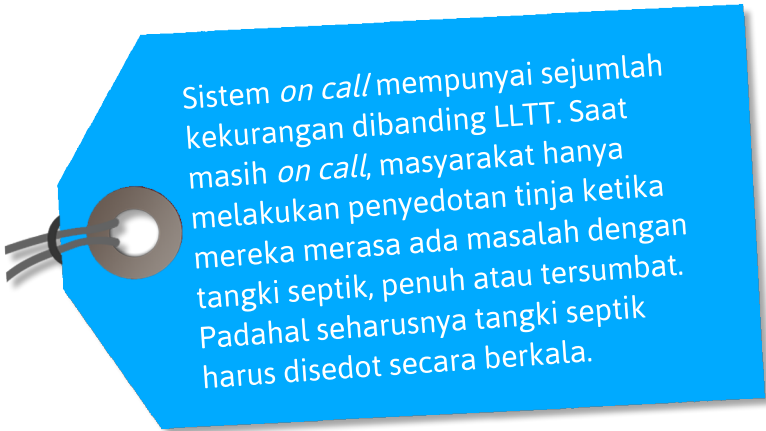
1 : Walikota Makassar bangga
memegang Piala Adipura

2 : Peresmian LLTT di Perumahan BTP
Tamalanrea Kota Makassar

Di Kota Makassar, (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) kini mulai diterapkan. Walikota Makassar, M Ramdhan “Danny” Pomanto menyebutkan, tinja harus dikelola dengan baik. Masyarakat juga harus aktif memikirkan limbah tinja mereka, agar tidak merusak lingkungan mereka sendiri. Untuk itu, harus ada inovasi agar masyarakat yang dahulu anti pati “mengurus” tinja bisa memberikan perhatian untuk ikut menyelesaikannya. “Sebenarnya tinja ini bisa memberikan 1001 manfaat, kalau dikelola dengan baik. Mulai meningkatkan pendapatan asli daerah, juga meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga produktivitas masyarakat juga meningkat yang pada akhirnya akan menambah indeks kebahagiaan,” ujar walikota yang biasa dipanggil Danny ini.

LLTT merupakan solusi untuk mengolah tinja dengan benar. Program ini awalnya diterapkan di Perumahan BTP Tamalanrea Blok A Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Ada 135 bangunan rumah yang menjadi pelanggan dalam program yang dikelola Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota Makassar. Untuk program ini UPTD IPAL Kota Makassar mempunyai manajemen kerja yang terdiri dari sosialisasi, pembinaan, penguatan kelembagaan, pelayanan penyedotan lumpur Tinja *on call* dan LLTT, pemeliharaan IPAL komunal, evaluasi kerja serta penyelenggaraan sensus data tangki septik individual.

“Apa yang saya banggakan dari program LLTT ini yakni *low budget* dan mengikutserakan partisipasi warga kota. Sementara efek yang terjadi kemudian adalah dampak bagi kesehatan warga yang berkorelasi langsung dengan indeks kebahagiaan warga Makassar yang saat ini mencapai 75,91% serta terjaminnya sumber-sumber air tanah kita dari ancaman pencemaran,” kata Danny Pomanto yang mengaku lama tinggal di lorong (gang) kumuh dan mengetahui banyak masalah yang ditimbulkan dari



sistem sanitasi buruk.

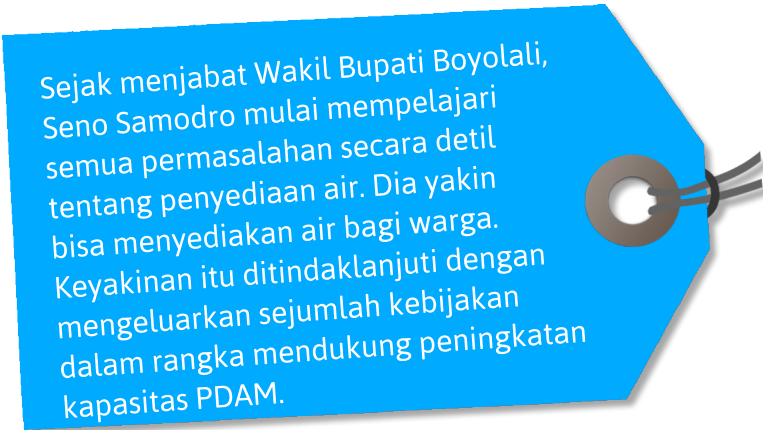
Sebenarnya, penyedotan tinja oleh UPTD IPAL dimulai pada 2011 lalu. Namun saat itu hanya menggunakan sistem *on call*, yaitu sesuai permintaan pelanggan. UPTD IPAL juga terus menyampaikan promosi tentang tangki septik sesuai standar SNI. Sistem *on call* mempunyai sejumlah kekurangan dibanding LLTT. Saat masih *on call*, masyarakat hanya melakukan penyedotan tinja ketika mereka merasa ada masalah dengan tangki septik, penuh atau tersumbat. Padahal seharusnya tangki septik harus disedot secara berkala.

Jika awalnya, LLTT baru diterapkan di Blok A Perumahan BTP Tamalanrea, kini, warga blok lain tertarik mengikuti program ini. Sebelum ikut program LLTT, rumah warga mesti disurvei dulu untuk mengetahui apakah tangki septik mereka sudah memenuhi standar. Jika belum standar, maka harus disesuaikan agar memenuhi SNI.

Kini program LLTT sudah direplikasi di sejumlah tempat lain di

Makassar. Replikasi di tempat lain di luar Blok A Perumahan BTP Tamalanrea merupakan bentuk *scale up* program ini. Rupanya keinginan warga yang tertarik dengan keberhasilan dari *pilot project* menjadi awal sebuah *scale up* berlangsung. Namun Pemkot Makassar tidak ingin *scale up* hanya berlangsung alamiah. Ada beberapa dukungan yang diberikan Pemkot agar *scale up* bisa berlangsung lebih cepat.

Misalnya, pada APBD, Pemkot menyiapkan bantuan berupa dua truk tinja untuk memperbesar volume penyedotan, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlayani. Pada APBD 2016 juga disiapkan dana APBD untuk memperbaiki sejumlah tangki septik agar memenuhi SNI, sehingga bisa dimasukkan dalam program LLTT. Yang lebih penting lagi adanya penyusunan peraturan daerah (Perda) untuk mendukung program ini.



Sejak menjabat Wakil Bupati Boyolali, Seno Samodro mulai mempelajari semua permasalahan secara detil tentang penyediaan air bagi warga. Keyakinan itu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas PDAM.

Jika Perda ini disetujui, maka mengikuti LLTT merupakan hal yang wajib diikuti masyarakat Kota Makassar. Pemerintah akan menerapkan *reward* dan *punishment* untuk memancing masyarakat mengikuti program ini.

Walikota Air Minum

Aksi heroik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan Bupati Boyolali, Seno Samodro. Bupati yang menjabat sejak tahun 2010 ini memberikan perhatian pada soal penyediaan air minum. Maklum, selama ini Boyolali selalu identik dengan wilayah yang selalu kesulitan air minum. Apalagi ada anggapan yang menyebutkan, berapa kalipun ganti bupati, ganti gubernur, hingga ganti presiden, air di Boyolali tetap tidak akan pernah mengalir.

Melihat anekdot sarkastik seperti itu, Seno tak ingin tinggal diam menerima takdir. Dia pun bertekad menghilangkan anggapan tersebut. Dia tak mau warganya menganggap air sebagai barang mahal.

Sebenarnya Boyolali kaya potensi air tanah, bahkan di wilayah ini ada sejumlah mata air seperti Tlatar di Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali. Daerah ini juga memiliki beberapa embung (waduk atau cekungan tempat penampungan air), sehingga tidak ada alasan bagi Boyolali mengalami kesulitan air. Namun pengelolaan air yang tidak baik mengakibatkan pemanfaatannya tidak menjangkau masyarakat secara luas.

Inilah yang menjadi biang keladi mengapa masyarakat sulit menikmati air padahal mereka kaya sumber air. Parahnya lagi, masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan dianggap sebagai takdir yang harus diterima, sehingga tidak ada jalan lain, selain pasrah. Maka dari itu, ketersediaan air menjadi persoalan

berkepanjangan di Boyolali.


Untuk mengatasi masalah tersebut penyelesaian normatif tidak lagi bisa diandalkan, sehingga diperlukan terobosan inovatif dan kreatif, termasuk keberanian seorang pemimpin/bupati untuk mencari solusi jitu yang andal. Melihat anekdot sarkastik di atas, Seno tertantang mencarikan jalan keluar. Ibaratnya, dia siap menjadi “tukang gali sumur” agar rakyatnya bisa menikmati air.

Sejak menjabat wakil bupati, Seno sudah mulai mempelajari semua permasalahan secara detil tentang penyediaan air. Dia yakin bisa menyediakan air bagi warga. Keyakinan itu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Sejumlah langkah yang dilakukan Seno semuanya adalah dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas PDAM. Dia mulai menghitung kembali setoran daerah yang diberikan kepada PDAM. Bukan hanya itu, Seno tidak ingin PDAM Boyolali bergantung pada pemerintah, sehingga dia menyesuaikan tarif yang diberlakukan PDAM kepada konsumen. “Tarif air harus disesuaikan. Harus *cost recovery*. Alhamdulillah, PDAM Boyolali kebetulan sudah masuk kategori sehat,” ujar mantan wartawan tersebut.

Tidak berhenti hanya dengan memperkuat PDAM, Seno juga membuat agar masyarakat merasa memiliki PDAM, salah satunya adalah dengan kewajiban membayar Rp 800 ribu untuk setiap penyambungan pipa ke rumah. Kewajiban ini sudah disubsidi. Sebab dana yang dibutuhkan untuk penyambungan pipa sebenarnya mencapai sebesar Rp 1,2 juta. Selain itu, pembayaran juga dibuat ringan karena bisa diangsur hingga tiga tahun. Artinya setiap bulan mereka cukup mengeluarkan Rp 30 ribu atau Rp 1.000 per hari.

Kerja keras Seno kini terbayar sudah. Masyarakat Boyolali kini bisa menikmati akses air minum layak. Jadi semua bergantung

pada *political will*, kemauan dan keinginan pemimpin untuk maju. Apalagi program yang dia lakukan ini adalah untuk memperkuat PDAM yang mempunyai fungsi besar sebagai aset Pemda. Keberhasilan peningkatan kapasitas PDAM tidak berarti membuat Seno berpuas diri dan hanya duduk manis, dia ingin setiap desa di Boyolali yang berjumlah 267 desa mempunyai embung yang akan menjadi sumber air untuk warga dan bisa dimanfaatkan PDAM sebagai penyedia air baku.



Kami berharap dapat menggugah dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki sanitasi di lingkungan agar target mencapai universal akses 100 - 0 - 100 yaitu 100 % akses terhadap air, 0 % daerah kumuh dan 100% akses sanitasi dapat tercapai.

M RISANGGONO

7 | Kolaborasi Sumber Daya

Sebuah peribahasa mengatakan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Prinsip inilah yang kerap digunakan untuk mengatakan aksi gotong-royong. Ibarat sebuah *orchestra*, alunan musik tidak akan harmoni jika para musisi yang terlibat di dalamnya tidak saling bekerjasama mengerjakan tugas masing-masing. Pola ini pula yang kerap dilakukan dalam menjalankan sebuah program dalam masyarakat jika ingin tujuan program tercapai.

Kolaborasi sering didefinisikan sebagai proses mencapai sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dilakukan secara individual atau satu pihak tertentu. Ada beberapa unsur dalam kolaborasi yang harus dipenuhi, yaitu bersama-sama membangun

KITA BISA

dan mengembangkan serta menyatukan pendapat untuk mencapai tujuan bersama, membagi tanggung jawab bersama-sama untuk mencapai tujuan, serta bekerjasama untuk mencapai tujuan dengan menggunakan semua sumber termasuk keahlian dan pengalaman dari masing-masing kolaborator. Sikap saling percaya dan mengetahui tanggung jawab masing-masing

Fasilitas perpipaan yang
dibangun oleh Aqua Group
beserta masyarakat dan
Pemda setempat





FOTO-FOTO: ROY RUBIANTO

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam setiap kolaborasi agar goal yang ingin dicapai bisa terwujud.

Pun begitu untuk bidang sanitasi dan air minum dalam rangka mencapai target Akses Universal 2019. Rasanya, tujuan ini tidak akan tercapai jika hanya pemerintah saja yang berjalan sendiri. Oleh karena itu, kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan.

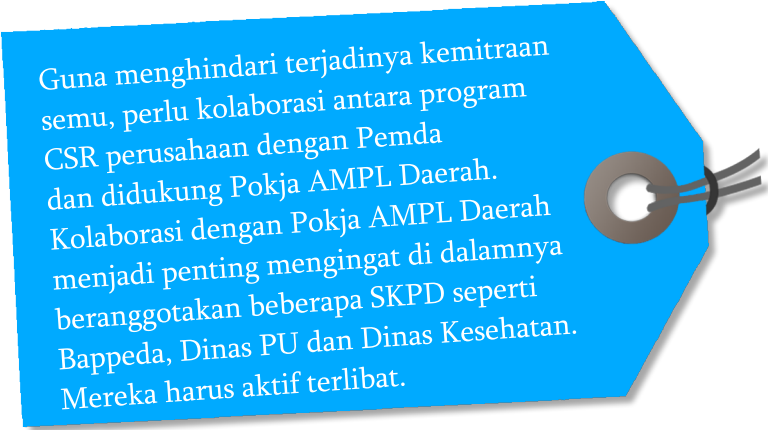
Saling Mengisi

Pembangunan air minum dan sanitasi di daerah tidak akan berjalan maksimal jika ego sektoral antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masih terjadi. Kadang masih terlihat ada satu program yang sama dilakukan dinas yang berbeda tanpa adanya koordinasi.

Bukan hanya antar SKPD, namun juga antara pemerintah daerah dengan lembaga donor dan perusahaan yang menyalurkan dana CSR untuk pembangunan air minum dan sanitasi juga dilihatnya kurang berjalan baik. Kondisi yang tidak ideal kadang disebut dengan kemitraan semu.

Guna menghindari terjadinya kemitraan semu, sejumlah antisipasi dilakukan sebelum program berlangsung. Pada program penyediaan air dengan perpipaan yang dilakukan Aqua Grup di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, perusahaan tersebut sejak awal melibatkan Pemda dan didukung Pokja AMPL Daerah. Program yang dimulai sejak April 2015 itu kemudian memilih Desa Kembang Kerang Daya di Kecamatan Aikmel dan Desa Beriri Jarak di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, sebagai lokasi penyaluran bantuan.

Kolaborasi dengan Pokja AMPL menjadi penting mengingat di dalamnya beranggotakan beberapa SKPD seperti Bappeda, Dinas PU dan Dinas Kesehatan. Mereka harus tahu apa saja program AQUA Grup di Lombok Timur. Tidak hanya memberi informasi, sejumlah *stakeholders*, beberapa SKPD juga harus terlibat aktif. Bappeda kemudian membentuk tim teknis dan non-teknis. Tim ini terdiri dari seluruh *stakeholders* yang bertugas menemukan fakta-fakta di lapangan baik terkait air minum maupun lima pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang meliputi stop BABS, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah



Guna menghindari terjadinya kemitraan semu, perlu kolaborasi antara program CSR perusahaan dengan Pemda dan didukung Pokja AMPL Daerah. Kolaborasi dengan Pokja AMPL Daerah menjadi penting mengingat di dalamnya beranggotakan beberapa SKPD seperti Bappeda, Dinas PU dan Dinas Kesehatan. Mereka harus aktif terlibat.

tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Sementara tim non teknis mencari dan mengumpulkan data terkait sosial-ekonomi masyarakat. Tantangan terbesar dalam setiap program adalah pembangunan komitmen. Seluruh *stakeholders* dituntut terlibat, baik dari tingkat masyarakat sampai dengan tingkat pemerintahan kabupaten maupun provinsi. Sehingga mereka mempunyai isu dan kepedulian bersama dalam menyelesaikan persoalan air minum.

Sejak dalam penentuan lokasi pun Pemda setempat terlibat. Pemda sebelumnya telah memprioritaskan kedua desa tersebut untuk mendapatkan pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Namun karena cakupan wilayah yang membutuhkan sarana air minum cukup luas, maka pembangunan belum dapat dilakukan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sangat mendukung



program Aqua ini.

Dahulu dua desa ini mempunyai sumber air yang bagus, namun karena banyaknya pohon kemiri yang ditebang untuk diganti dengan kopi, jati, dan kakao, maka sumber air mulai berkurang. Pohon kemiri memang dikenal sebagai pohon yang bisa mengikat air tanah. Sementara beberapa tanaman komoditas baru itu tidak mampu menyerap dan menyimpan air lebih dibanding kemiri. Saat itu masyarakat mulai merasakan bahwa ada satu perubahan ketika kemudian pohon kemiri habis,



FOTO : ISTIMEWA

Pundi Amal SCTV pernah berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam menggelar Lomba Teknologi Tepat Guna

maka titik-titik sumber mata air hilang. Desa Beriri Jarak juga mengalami krisis dan cerita yang sama. Bedanya, sumber air di Beriri Jarak diakses oleh beberapa desa, salah satunya Desa Kembang Kerang Daya. Jika pengelolaan air Desa Beriri Jarak tidak didukung, bisa dipastikan pembangunan di Kembang Kerang Daya hanya akan bertahan 6 bulan atau satu tahun, karena masing-masing desa saling berkaitan.

Dalam kemitraan multi pihak ini masyarakat juga memiliki peranan penting. Hal itu terlihat dari swadaya warga membangun

sarana air minum, dengan mengeluarkan uang untuk membeli material dan bergotong royong memasang pipa lebih dari 35 kilometer. Pemerintah daerah memainkan perannya dengan menyediakan sambungan rumah bagi lebih dari 3.500 keluarga.

Berbagi Informasi dan Strategi

Kolaborasi yang melibatkan pihak swasta juga diperlihatkan oleh Pundi Amal SCTV. Dalam menyalurkan dana CSR (*corporate social responsibility*) nya, Pundi Amal SCTV juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lembaga yang memberikan perhatian pada masalah air minum dan sanitasi seperti IUWASH (*Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene*) agar mendapatkan hasil pembangunan yang maksimal.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Pundi Amal SCTV secara umum memberikan perhatian pada empat hal penanganan bencana, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Sekitar 10%-15% dana dari Pundi Amal SCTV dialokasikan untuk pembangunan air minum dan sanitasi.

“Kami sudah melakukan aksi sejak tahun 2008. Sebelum ke bidang ke bidang sanitasi, kami melakukan pengaliran air bersih dari sumber air yang ada di gunung ke desa di Serang Banten, kemudian kami juga membangun sarana MCK (mandi, cuci, kakus). Pengaliran air bekerjasama dengan Kodam Siliwangi,” kata M Risanggono Soemaryono, Direktur Pundi Amal SCTV.

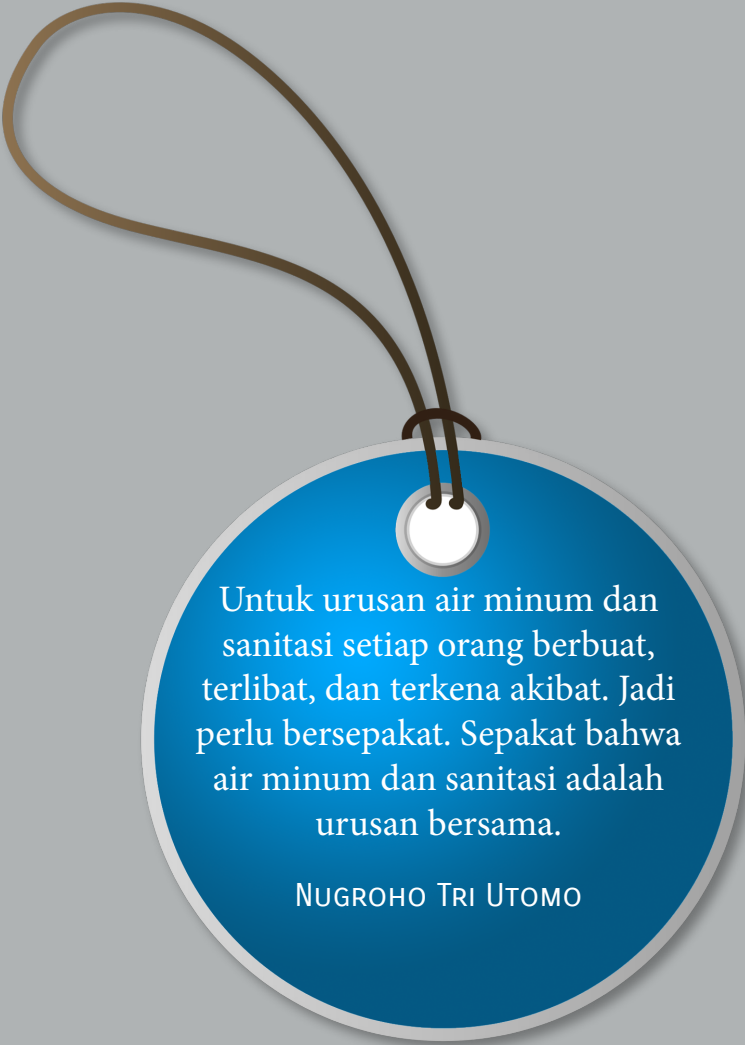
Pembangunan akses air minum dan sanitasi yang dilakukan Pundi Amal SCTV berlanjut ke sejumlah daerah. Surabaya, Jakarta, Makassar, Tangerang dan daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan daerah yang pernah merasakan sentuhan pembangunan yang dilakukan Pundi Amal SCTV. Bentuk pembangunan yang dilakukan pun beragam, tergantung

kebutuhan masyarakat di daerah tujuan.

Di Kota Surabaya, Pundi Amal SCTV memberikan bantuan berupa dana bergulir. Ada dana sekitar Rp100 juta yang dihibahkan untuk sekitar 23 - 30 keluarga untuk membangun jamban sehat. Pundi Amal SCTV memang tidak meminta keluarga yang mendapatkan bantuan untuk mengembalikan dana tersebut ke Pundi Amal SCTV, namun dana itu harus bergulir, sehingga makin banyak keluarga yang mempunyai jamban sehat. Dana yang sudah dikembalikan kemudian disalurkan kembali kepada keluarga lain yang belum mempunyai jamban sehat. Begitu seterusnya.

“Kita lebih banyak ke pembangunan fisik dan juga dana bergulir kepada masyarakat. Seperti di Surabaya itu kita kasih dana kemudian mereka bangun sanitasinya sendiri dengan tangki septik dan kemudian terus berjalan,” ujar Risanggono.

Di bidang sanitasi, Pundi Amal SCTV juga pernah berkolaborasi dengan sejumlah pihak saat menggelar Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG), beberapa tahun lalu. Kolaborasi ini mampu menghasilkan TTG yang memberikan kontribusi pada masalah sanitasi di tengah masyarakat.



Untuk urusan air minum dan sanitasi setiap orang berbuat, terlibat, dan terkena akibat. Jadi perlu bersepakat. Sepakat bahwa air minum dan sanitasi adalah urusan bersama.

NUGROHO TRI UTOMO

8

Konduktor

Pembangunan AMPL

Pernah dengar musik orkestra? Harmonisasi musik yang tercipta begitu indah. Alunan musik orkestra yang indah lahir dari kerjasama para musisi yang memainkan instrument musik. Mereka mengikuti arahan seorang *music director* atau yang kita kenal dengan sebutan konduktor untuk menghasilkan lagu berkualitas yang nyaman didengar. Ilustrasi orkestra ini juga harus terjadi pada pembangunan air minum dan sanitasi. Dibutuhkan kerjasama banyak pihak yang mengikuti gagasan seorang pemimpin.

Bedanya, jika ada dalam sebuah grup orkestra berisi para musisi, dalam pembangunan air minum dan sanitasi terdapat banyak pihak dengan profesi dan peran berbeda. Di sinilah

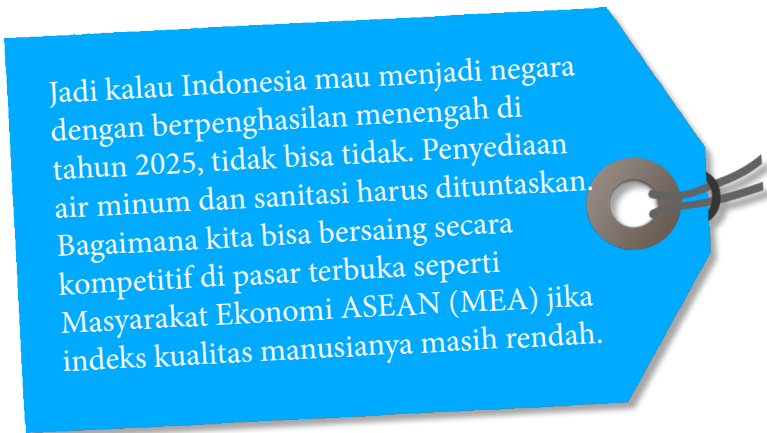
dibutuhkan seorang pemimpin seperti konduktor orkestra. Peran inilah yang dilakoni Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas bersama beberapa para sejumlah direktur bidang air minum dan sanitasi, baik yang sedang menjabat maupun yang pernah mengembang amanat tersebut. Di lingkungan Bappenas, ada Basah Hernowo (Direktur Permukiman dan Perumahan 2002 - 2007), Budi Hidayat (Direktur Perumahan dan Permukiman 2007 - 2010), dan Nugroho Tri Utomo (Direktur Permukiman dan Perumahan 2010 - sekarang).

Sementara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada Danny Sutjiono (Direktur PSPAM 2007-2014), Mochammad Natsir (Direktur PSPAM 2014 - sekarang), Susmono (Direktur PPLP 2005-2010), Sjukrul Amin (PPLP 2010-2012), Djoko Mursito (Direktur PPLP 2013 - 2014), Maliki Moersid (Direktur PPLP 2014 - 2015), Dodi Krispratmadi (Direktur PPLP 2015 - sekarang). Sedangkan di Kementerian Kesehatan diwakili oleh Wan Alkadri (Direktur Penyehatan Lingkungan 2009), dan Wilfred H Purba (Direktur Penyehatan Lingkungan 2011 - sekarang). Selain itu ada Oswar Mungkasa yang sejak tahun ini menjabat sebagai Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, ia juga telah lama berkisah di bidang air minum dan sanitasi.

Pak Nug mempunyai pengalaman karir yang panjang di bidang pembangunan air minum dan sanitasi, termasuk menjadi Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional. Pengalaman panjang ini membuat Pak Nug, begitu dia biasa disapa, memiliki gagasan dan sentuhan untuk mengembangkan program air minum dan sanitasi berjalan harmonis. Pak Nug juga kerap berhubungan dengan pelaku pembangunan dan non-pemerintah, instansi, pemerintah

terkecil hingga pemegang kebijakan di pusat.

Selama menjabat, jasa Pak Nug sangat besar. Sebagai seorang “konduktor”, Pak Nug ingin memastikan akses universal air minum dan sanitasi tercapai. Ia berperan aktif merumuskan kebijakan nasional sektor permukiman dan perumahan serta aktif dalam menggerakkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai keberhasilan akses air minum dan sanitasi. Beberapa program yang diinisiasi oleh Pak Nug berhasil mengangkat prioritas air minum dan sanitasi adalah PPSP, PAMSIMAS, dan hibah berbasis output. Ketiga program ini memiliki kata kunci *ownership* dan kolaborasi antar pihak.



ISSDP (*Indonesia Sanitation Sector Development Program*) yang dimulai sejak 2006 adalah program pertama Pak Nug yang berhasil mengubah mindset banyak pihak akan pentingnya sanitasi. Keberhasilan ISSDP ini diakui oleh Bapak Wapres Boediono dalam KSN 2 yang dilaksanakan pada 2009. Pendekatan yang diusung oleh Pak Nug bersama Pak Mus, dan Pak Soemono



ini diperluas pada skala nasional. Pada 2010, ISSDP resmi menjadi program nasional dengan nama Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP). PPSP adalah platform pembangunan sanitasi yang menekankan adanya *ownership* dari pemerintah daerah sebagai *enabler* pembangunan sanitasi di daerah. *Ownership* ini ditumbuhkan melalui adanya perbaikan kerangka kerja layanan

PARA DIREKTUR AIR MINUM DAN SANITASI



Susmono
Direktur PPLP (2005-2010)
Kementerian PU



Sjukrul Amin
Direktur PPLP (2010-2012)
Kementerian PU



Danny Sutjiono
Direktur PSPAM (2007-2014)
Kementerian PU



Mochammad Natsir
Direktur PSPAM (2014-Sekarang)
Kementerian PUPR

memberi penekanan pada kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Hingga 2015 sudah ada 465 kab/kota yang sudah memiliki SSK. Pencapaian ini menjadi salah satu pijakan utama untuk mencapai akses universal air minum dan sanitasi.

Program lainnya yang mengedepankan prinsip *ownership*



Basah Hernowo
Direktur Perumahan dan
Permukiman (2002-2007)
Kementerian PPN/Bappenas



Budi Hidayat
Direktur Perumahan dan
Permukiman (2007-2010)
Kementerian PPN/Bappenas



Nugroho Tri Utomo
Direktur Perumahan dan
Permukiman (2010-Sekarang)
Kementerian PPN/Bappenas



Djoko Mursito
Direktur PPLP (2013-2014)
Kementerian PU



Maliki Morsied
Direktur PPLP (2014-2015)
Kementerian PUPR



Dodi Krispratmadi
Direktur PPLP (2015-Sekarang)
Kementerian PUPR



Wan Al Kadri
Penyehatan Lingkungan (2009)
Kementerian Kesehatan



Wilfred H Purba
Direktur Penyehatan Lingkungan
(2011-Sekarang)
Kementerian Kesehatan



Oswar Mungkasa
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
(2015-Sekarang)

dengan berbasis masyarakat yang juga diusung Pak Nug adalah PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program ini dilaksanakan di perdesaan dan periurban dengan tujuan untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika kata kunci ISSDP/PPSP adalah *ownership* Pemda untuk air minum dan sanitasi, PAMSIMAS menumbuhkan *ownership* di Pemda dan

masyarakat.

PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dari proses perencanaan hingga, pasca pembangunan. Sejak reformasi 1998, masyarakat yang sebelumnya hanya sebagai objek kini menjadi subjek pembangunan. Inilah yang diinisiasi oleh Pak Nug untuk ditanamkan di PAMSIMAS bersama Pak Basah dan Pak Danny. *Ownership* masyarakat ini ditandai dengan adanya rencana kerja masyarakat (RKM) yang disusun oleh calon masyarakat pengguna sarana PAMSIMAS. Untuk lebih meningkatkan *ownership*, *in-kind* dan *in-cash* juga menjadi fitur yang diusung PAMSIMAS untuk menjamin keberlanjutan sarana air minum dan sanitasi terbangun. *In-kind* adalah kontribusi non-materi dari masyarakat mulai perencanaan hingga pembangunan sarana. Sementara, *in-cash* adalah kontribusi uang yang dipergunakan untuk membangun sarana tersebut. "Ringkasnya, untuk urusan air minum dan sanitasi setiap orang berbuat, terlibat, dan terkena akibat. Jadi perlu bersepakat. Sepakat bahwa sanitasi adalah urusan bersama", ungkap Pak Nug.

Selama 2008-2015, sudah ada tambahan sebesar 8 juta masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak di 12.000 desa di 220 kabupaten/kota di 24 provinsi. Pada 2016-2019 PAMSIMAS dilanjutkan di 15.000 desa di 33 provinsi. PAMSIMAS adalah platform pembangunan air minum dan sanitasi di perdesaan dan peri-urban karena diakui sebagai pendekatan paling efektif untuk mencapai akses universal, dimana sumber air tersedia dan pendekatan berbasis masyarakat dapat diaplikasikan.

Program lain yang menjadi unggulan atas inisiasi Pak Nug bersama dengan Pak Danny dan Pak Sjukrul adalah Hibah Air Minum dan Sanitasi. Program ini menekankan komitmen

pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi air minum dan sanitasi. *Ownership* Pemda terhadap air minum dan sanitasi khususnya untuk penyediaan sambungan rumah (SR) air minum dan air limbah di perkotaan ditimbulkan melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dari Pemda ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah Air Limbah (PDAL). Selain komitmen untuk meningkatkan investasi, fitur lain dari hibah air ini adalah prinsip berbasis output yang artinya dana penggantian PMP akan disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah jika SR sudah terbangun dan terverifikasi berfungsi bagi masyarakat. Sebelum tahun 2009 banyak Pemda yang tidak memiliki “*sense of belonging*” akan PDAM dan PDAL. Padahal kedua badan tersebut adalah penyelenggara air minum perkotaan.

Hibah telah menambah sambungan rumah (SR) sebesar 330.000 SR air minum dan 9.000 SR air limbah di 121 kabupaten/kota. Mekanisme berbasis output ini yang kemudian diadopsi oleh mekanisme APBN untuk menjamin investasi air minum dan sanitasi berkontribusi terhadap peningkatan akses air minum dan sanitasi di perkotaan.

Saat ini komitmen para pihak makin baik, begitu juga dengan komitmen pemerintah untuk air minum dan sanitasi. Hal itu menunjukkan bahwa prioritas terhadap air minum dan sanitasi sudah semakin tinggi. Jadi, akses universal 2019 akan tercapai. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan pendekatan yang menyentuh semua dimensi. Semua elemen pembangunan perlu diarahkan agar tercipta harmonisasi “lagu” pembangunan air minum dan sanitasi.

Para champion pembangunan adalah mereka yang berjuang melampaui kebiasaan manusia biasa. Mereka menempati peringkat tertinggi dalam Piramid Kebutuhan menurut Maslow di mana gerak hidupnya sudah terlepas dari pemenuhan kebutuhan dirinya semata namun sudah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan orang lain.

Mereka muncul dari masyarakat dan keberadaannya tidak melekat pada usia, jabatan dan jenis pekerjaan. Mereka terpanggil oleh sebuah kesadaran yang mendalam untuk mengatasi sebuah permasalahan yang bertahun-tahun dihadapi oleh masyarakat. Lebih jauh lagi mereka mampu mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat.

Buku ini merupakan volume kedua serial Policy Entrepreneurship yang berisi kumpulan kiprah para pelopor pembangunan air minum dan sanitasi dengan harapan menjadi inspirasi berbagai pihak bahwa kita semua bisa melakukannya.



“Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, 40% rakyat Indonesia belum mendapatkan air bersih, dan 30% belum mendapatkan sanitasi yang baik. Angka ini harus menginspirasi kita untuk bergerak dan memanfaatkan potensi yang ada.”

Mohamad Subuh, Dirjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan.

“Di era sekarang, saat teknologi dan komunikasi berkembang pesat, standar ekspektasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah harus mengimbangi ekspektasi tersebut melalui penyelenggaraan infrastruktur yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tugas pemerintah, namun tugas bersama.”

Andreas Suhono, Direktur Jenderal Cipta Karya KemenPU-PR.

“Tanpa layanan air minum dan sanitasi yang handal, maka pembangunan di sektor lainnya akan mengalami kendala yang luar biasa. Pembangunan pada sektor kesehatan sangat bergantung pada layanan air minum dan sanitasi tidak hanya secara fisik namun juga secara perilaku.”

Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kemen PPN/BAPPENAS.



ISBN 978-602-72978-1-4

